

ANALISA

1975







# **ANALISA**

**MASALAH - MASALAH  
INTERNASIONAL**

**DAERAH-DAERAH BERGOLAK**

**DI SEKITAR**

**SAMUDERA INDONESIA**

**TAHUN IV. NO. 11**

**NOPEMBER 1975**





## PENGANTAR PENERBIT

Dalam penerbitan ANALISA tahun-IV nomor 11 bulan Nopember ini secara sadar kami mengetengahkan beberapa uraian mengenai daerah-daerah bergolak di sekitar Samudera Indonesia, disusun oleh Kirdi DIPOYUDO dan O. Abdul RACHMAN, berkisar kepada permasalahan di Libanon, Sahara Barat, Bangladesh, Afrika Selatan dan Angola.

Uraian-uraian tersebut telah ditulis sekitar bulan Nopember, namun karena kesulitan-kesulitan teknis yang tidak dapat dihindarkan maka baru sekarang sempat disampaikan ke tangan Anda. Sekalipun demikian inti uraian yang dibawakan dalam tulisan-tulisan tersebut kiranya tidaklah menjadi basi ataupun daluwarsa, karena tulisan-tulisan tersebut mengandung banyak informasi mengenai keadaan, penyebab dan pelaku-pelaku di dalam permasalahan yang masih berlangsung.

Uraian mengenai "Beberapa Daerah-daerah Bergolak di sekitar Samudera Indonesia" penting untuk kami ketengahkan bukan saja karena saling bunuh-membunuh sudah tidak tepat dalam alam kebudayaan manusia modern dewasa ini, tetapi juga karena Samudera Indonesia merupakan batas sebelah barat dan selatan dari negara di mana kita hidup. Artinya, bahwa secara langsung atau tidak langsung, masalah damai atau perang di kawasan itu adalah juga merupakan bagian dari permasalahan kita, lebih-lebih dalam dunia yang makin terasa menyempit dan interdependensi yang makin membesar. Kita tidak dapat bersikap masa bodoh ataupun pasrah, namun seyogyanyalah minimal perlu mencoba memahaminya walaupun mungkin tidak ikut menyelesaikannya.

Semoga penerbitan ini akan bermanfaat bagi para Pembaca, terutama bagi mereka yang berkecimpung dengan permasalahan luar negeri ataupun sarjana-sarjana yang bergerak di bidang penelitian masalah-masalah internasional.





# DAFTAR ISI

Hal.

Pengantar Penerbit

i

Pergolakan di Libanon

Kirdi DIPOYUDO

3

Fosfat di Sahara Barat

O. Abdul RACHMAN

17

Bangladesh: Negeri Orang Bengali

O. Abdul RACHMAN

23

Benteng Putih di Afrika, Detente atau Detensi?

O. Abdul RACHMAN

31

Perebutan Kekuasaan di Angola

Kirdi DIPOYUDO

47



Diterbitkan oleh

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Tanah Abang III/27, Jakarta





## PERGOLAKAN DI LIBANON

Kirdi DIPGUYUDO

### Pengantar

Pertempuran-pertempuran antar golongan yang berkobar di Libanon sejak bulan April 1975 dengan selingan gencatan-gencatan senjata dapat disebut perang saudara dan merupakan suatu perkembangan penting. Sebagai akibatnya beribu-ribu orang luka-luka dan tewas, perekonomian Libanon menderita kerugian yang besar sekali dan negeri itu terancam bahaya kehilangan peranannya sebagai pusat perdagangan, perbankan dan turisme di Timur Tengah. Bentrokan-bentrokan bersenjata itu juga sangat berbahaya karena dapat mengobarkan suatu peperangan baru di Timur Tengah yang lebih dahsyat dari peperangan-peperangan sebelumnya di kawasan itu. Perkembangan ini semua dapat menentukan hari depan Libanon.

Sengketa yang mengobarkan pertempuran-pertempuran itu pertama-tama berkisar pada pembagian kekuasaan yang didasarkan atas persetujuan antara umat Kristen dan umat Muslim Libanon yang dicapai pada tahun 1943 ketika jumlah umat Kristen sedikit lebih banyak. Umat Muslim kini merasa telah menjadi mayoritas dan oleh sebab itu menuntut agar pembagian kekuasaan tersebut ditinjau kembali, tetapi umat Kristen berkeras untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan kedudukan mereka. Pokok sengketa lain yang akhir-akhir ini semakin tampil ke muka ialah pembagian kembali pendapatan dan kekayaan nasional. Golongan miskin menuntut bagian kemakmuran yang lebih besar, tetapi golongan berada tidak bersedia melepaskan kepentingan-kepentingan mereka. Sementara itu, sengketa menjadi lebih sulit sifatnya dengan kehadiran seperempat juta pengungsi Palestina, terutama organisasi-organisasi gerilyawan mereka, di wilayah Libanon, yang sekaligus merupakan pokok dan pihak sengketa.

Pergolakan di Libanon itu adalah tema tulisan ini. Secara berturut-turut akan dibicarakan pihak-pihak yang bersangkutan dan pokok-pokok sengketa, polarisasi kekuatan,



campur tangan asing, bahaya eskalasi perang saudara ini menjadi suatu peperangan baru di Timur Tengah, usaha-usaha perdamaian dan prospek penyelesaiannya. Sebagai titik tolak untuk lebih memahami persoalannya, akan dibahas lebih dahulu komposisi rakyat Libanon dan dasar konfesional kehidupan politik mereka yang merupakan latar belakang sengketa antar golongan itu.

### Latar belakang

Dengan 10.400 km<sup>2</sup> wilayah, sekitar 3 juta orang penduduk dan GNP sebesar \$ 2.900 juta pada tahun 1973, Libanon adalah suatu negeri kecil tetapi karena berbagai hal menarik. Libanon adalah satu-satunya negeri Arab yang pada waktu mendapatkan kemerdekaannya mempunyai mayoritas penduduk Kristen dan selama ini diperintah oleh seorang Kristen sebagai Presiden Republik. Libanon adalah tetangga Israel yang ikut bertempur melawannya dalam perang 1948-1949, tetapi sejak itu berusaha menghindari keterlibatan dalam sengketa Arab-Israel. Libanon adalah juga suatu negeri di Timur Tengah, yang golongan elitnya mempunyai hubungan erat dengan dunia barat, terutama Perancis dan Amerika Serikat, dalam bidang ekonomi dan kebudayaan. Rakyat Libanon tidak homogen, tetapi terdiri atas dua kelompok besar yang hampir sama kuatnya, yaitu umat Kristen dan umat Muslim, yang masing-masing pecah dalam berbagai kelompok yang lebih kecil. Kelompok Kristen mencakup umat Kristen Maronit, umat Yunani Ortodoks, Yunani Katolik, umat Armenia Ortodoks, Armenia Katolik, umat Kristen Protestan dan beberapa kelompok kecil lainnya, sedangkan kelompok Muslim terdiri atas umat Muslim Sunni dan umat Muslim Shia yang hampir sama kuatnya dan umat Drus (lihat Tabel 1).

Umat Kristen dengan gigih membela kemerdekaan nasional Libanon sambil menentang integrasi Libanon ke dalam federasi atau persatuan Arab yang lebih besar, dan berusaha membatasi keterlibatannya dalam sengketa Arab-Israel. Sebaliknya umat Muslim menginginkan partisipasi yang lebih besar dalam kehidupan politik Arab dan terbuka untuk suatu federasi dengan negara-negara Arab lainnya<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Lihat H.B. Sharabi, Governments and Politics of the Middle East in the Twentieth Century (New Jersey - New York - London, 1963), hal. 135-147.



Selama ini susunan politik dan pemerintahan didasarkan atas perimbangan antara kelompok-kelompok keagamaan itu. Kekuasaan dan kedudukan-kedudukan penting dalam negara dibagi antara mereka sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing. Susunan administratif berdasarkan agama itu secara formil dimulai pada tahun 1861 ketika Pemerintah Usmaniyah Turki membentuk sanjak (daerah) otonom Libanon. Dalam Perang Dunia I sanjak ini dihapus, tetapi kemudian azasnya dihidupkan kembali oleh Perancis yang mendapatkan Suriah dan Libanon sebagai negeri mandat. Susunan konfesional itu bahkan diperkuat sebagai sarana yang paling baik untuk mempertahankan kekuasaan kolonial. Pada tahun 1936 dan 1938 misalnya pengadilan-pengadilan agama diakui Pemerintah dan hukumnya diberi status hukum negara, dan sebagai akibatnya kedudukan pemimpin-pemimpin agama menjadi lebih kuat<sup>1</sup>.

TABEL 1

---

 KELOMPOK-KELOMPOK KEAGAMAAN LIBANON
 

---

Nama kelompok	1958
Kristen	792.000
Kristen Maronit	424.000
Kristen Yunani Katolik dan Latin	91.000
Kristen Armenia Katolik	14.500
Kristen Yunani Ortodoks	150.000
Kristen Armenia Ortodoks	69.000
Muslim	624.000
Muslim Sunni	286.000
Muslim Shia	250.000
Muslim Drus	88.000
Yahudi	6.600
Jumlah	1.422.600

Catatan: Kelompok terbesar ialah umat Kristen Maronit. Menurut perkiraan pada tahun 1972 penduduk Libanon berjumlah 2.600.000 orang dan pada tahun 1975 jumlah itu telah menjadi 3.140.000 orang, hampir separuh di Beirut, tetapi tiada perincian.

Sumber: W.B. Fisher, "Lebanon", dalam The Middle East and North Africa 1974-1975 (London, 1975), 505.

Pada tahun 1943, ketika Libanon mendapatkan kemerdekaan dari Perancis, pemimpin-pemimpin umat Kristen dan umat Muslim membuat suatu persetujuan akomodasi yang dikenal sebagai Pakta Nasional. Persetujuan ini menyatakan persaudaraan seluruh rakyat dan menandakan kemerdekaan Libanon. Umat Kristen

<sup>1</sup> Lihat H.B. Sharabi, op. cit. hal. 136.



mengakui watak Arab Libanon dan melepaskan ikatan mereka dengan negara-negara barat, sedangkan umat Muslim berjanji akan membela kemerdekaan negeri dan melepaskan tuntutan untuk menyatukannya dengan Suriah atau negara-negara Arab lainnya. Selanjutnya kedua golongan itu setuju untuk membagi kekuasaan dan kedudukan-kedudukan penting dalam pemerintahan dengan ratio 6 lawan 5 sesuai dengan kekuatan numerik masing-masing pada waktu itu. Seorang Kristen Maronit akan menjadi Presiden Republik, seorang Muslim Sunni Perdana Menteri, seorang Muslim Shia Ketua parlemen, dan seorang Kristen Panglima Angkatan Bersenjata.<sup>1</sup> Secara demikian umat Kristen mempunyai kedudukan yang lebih kuat, terutama karena Libanon menganut sistim pemerintahan presidensiil (lihat Tabel 2).

TABEL 2

=====

PROPORSI PERWAKILAN KONFESIONIL DALAM PARLEMEN (1975)

=====

Kelompok	Kristen	Muslim
Kristen Maronit	30	
Muslim Sunni		20
Muslim Shia		19
Kristen Yunani Ortodoks	11	
Kristen Yunani Katolik	6	
Muslim Drus		6
Kristen Armenia Ortodoks	4	
Kristen Armenia Katolik	1	
Kristen Protestan	1	
Kristen lain	1	
	54	45

=====

Sumber: W.B. Fisher, "Lebanon", dalam The Middle East and North Africa 1974-1975 (London, 1975), 502.

Libanon menganut sistim demokrasi parlementer dan kini terdapat 17 partai politik, tetapi parlemen selalu lemah dan kurang efektif karena kedudukan dominan Presiden Republik dan susunan konfesionalnya itu. Presiden dipilih oleh parlemen tetapi tidak bertanggung jawab kepadanya dan dapat membuat undang-undang tanpa partisipasinya. Dia juga dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, termasuk perdana menteri. Dalam keadaan serupa itu partai-partai politik juga tidak mempunyai banyak pengaruh dalam kehidupan politik. Sesudah tahun 1960 sejumlah anggota partai berhasil mendapatkan kursi dalam parlemen, tetapi mereka tidak dipilih sebagai wakil

<sup>1</sup> Lihat George Lenczowski, The Middle East in World Affairs (Ithaca, 1964), hal. 341



partai melainkan sebagai warga kelompok keagamaan. Sebagai golongan agama yang paling besar, umat Kristen Maronit mempunyai banyak pengaruh dan suaranya menentukan dalam pemilihan Presiden. Seperti dapat dilihat pada tabel 2, mereka kini menduduki 30 dari 99 kursi parlemen.

### Pihak-pihak sengketa

Sengketa antar golongan di Libanon ini pertama-tama adalah sengketa antara golongan Kristen dan golongan Muslim yang dibantu unsur-unsur radikal gerakan pembebasan Palestina. Pertempuran-pertempuran bulan April, Mei dan Juni adalah antara milisia Kristen dan gerilyawan-gerilyawan Palestina; dalam bulan September antara milisia Kristen dan milisia Muslim; dan sejak pertengahan bulan Oktober banyak gerilyawan Palestina ikut bertempur lagi di pihak milisia Muslim. Golongan Kristen membela status quo sedangkan golongan Muslim berusaha untuk merombaknya dan menciptakan suatu tata politik, sosial dan ekonomi baru sebagai gantinya. Selain itu golongan Muslim berhadapan dengan golongan Kristen sebagai kaum miskin berhadapan dengan kaum kaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sengketa antar golongan di Libanon adalah suatu sengketa di mana penduduk Kristen berhadapan dengan penduduk Muslim sebagai golongan agama, sebagai golongan kanan lawan golongan kiri dan sebagai kaum berada lawan kaum miskin. Dalam sengketa ini keluarga-keluarga terkemuka seperti keluarga Presiden Franjieh, keluarga PK Kareni, keluarga Camille Chamoun, keluarga Kamal Jumblatt dan lain sebagainya memainkan peranan yang penting. Demikianpun partai-partai politik yang dibentuk kedua golongan dan masing-masing mempunyai pasukan-pasukan milisia swasta.<sup>1</sup>

Kelompok yang paling militan dan agresif di kalangan umat Kristen adalah Partai Phalangis pimpinan Pierre Gamayel, yang mempunyai 40.000 orang milisia, dan mendapat dukungan dari Presiden Franjieh dan Camille Chamoun, seorang bekas Presiden. Lawan utamanya ialah Partai Sosialis Progresif pimpinan Kamal Jumblatt, Partai Komunis Liberal dan gerilyawan-gerilyawan PLO yang radikal.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Lihat Eric Rouleau, "Lebanon's absent state", The Guardian, 11 Oktober 1975; "Reform or revolution", The Guardian, 19 Oktober 1975.

<sup>2</sup> Lihat "The Lebanese powder-keg", dalam Foreign Report, 24 September 1975; Eric Rouleau, Clashes of private armies in Lebanon's civil war", dalam The Guardian, 4 Oktober 1975.



## Pokok-pokok sengketa

Pokok sengketa antar golongan itu pertama-tama ialah pembagian kekuasaan. Golongan Muslim menuntut agar pembagian kekuasaan yang berlaku selama ini ditinjau kembali. Berkat laju pertumbuhan yang lebih tinggi kini mereka merasa telah menjadi lebih banyak dari umat Kristen dan sesuai dengan itu menuntut bagian kekuasaan yang lebih besar. Akan tetapi golongan Kristen dengan berbagai dalih menolak tuntutan tersebut dan berusaha sekuat tenaga mempertahankan status quo yang menjamin kedudukan dominan dalam pemerintahan bagi mereka. Selama ini mereka juga menolak setiap usaha untuk mengadakan suatu sensus karena khawatir hasilnya akan membenarkan klaim golongan Muslim bahwa mereka telah menjadi mayoritas dan oleh sebab itu juga berhak atas kedudukan yang lebih kuat. Golongan Muslim rupanya kini bertekad untuk menggunakan kekerasan guna mendukung klaim mereka.<sup>1</sup>

Pokok sengketa kedua ialah kehadiran sekitar seperempat juta pengungsi Palestina, khususnya 20.000 orang gerilyawan, yang mempunyai persenjataan lengkap serta modern dan menguasai kamp-kamp pengungsi. Golongan Kristen, biarpun mendukung perjuangan rakyat Arab Palestina untuk mendapatkan hak-hak nasional mereka, umumnya kurang senang dengan kehadiran mereka itu dan anti PLO. Mereka menyalahkan gerilyawan-gerilyawan Palestina sebagai biang keladi ketegangan dan bentrokan-bentrokan bersenjata antar golongan sekarang ini. Mereka sangat tidak senang gerilyawan-gerilyawan itu menguasai kamp-kamp pengungsi dan merubahnya menjadi kamp-kamp latihan militer dan pangkalan-pangkalan bersenjata. Pemimpin-pemimpin Partai Phalangis melihat mereka sebagai suatu negara dalam negara dan Presiden Franjieh pernah menyamakan mereka dengan tentara pendudukan. Golongan Kristen juga sangat berkeberatan PLO menggunakan wilayah Libanon sebagai pangkalan untuk melancarkan aksi-aksi gerilya terhadap Israel dan secara demikian memancing serangan-serangan pembalasan, yang tidak hanya melanggar kedaulatan Libanon melainkan juga menimbulkan kerusakan-kerusakan dan kerap kali juga banyak minta korban jiwa. Sebaliknya umat Muslim umumnya simpatik terhadap orang-orang Palestina dan mendukung aksi-aksi gerilya PLO. Mereka merasa bahwa berkat kehadiran pengungsi-pengungsi dan gerilyawan-gerilyawan Palestina itu kedudukan mereka menjadi lebih kuat. Kenyataannya

---

<sup>1</sup> Lihat "Land without leaders", Newsweek, 6 Oktober 1975, 17-18



pasukan-pasukan milisia Muslim mendapatkan sebagian besar senjata dan amunisi mereka dari gerilyawan-gerilyawan Palestina, yang juga melatih mereka.<sup>1</sup>

Gerilyawan-gerilyawan Palestina bukan hanya pokok sengketa tetapi juga menjadi pihak dalam sengketa itu. Menanjaknya gerakan mereka, terutama setelah Jordania menindas PLO dan mengusirnya dari wilayahnya, merupakan sumber utama keresahan di Libanon. Golongan kanan, khususnya Angkatan Bersenjata dan golongan Phalangis, sangat tidak senang dengan sikap dan kegiatan-kegiatan mereka, yang merupakan tantangan bagi kekuasaan negara. Pemerintah berkali-kali berusaha mengendalikan mereka seperti negara-negara Arab lainnya, tetapi selalu sia-sia, terutama karena tekanan negara-negara Arab itu. Seperti kita lihat di atas, perang saudara di Libanon sekarang ini mulai dengan pertempuran-pertempuran antara milisia Kristen dan gerilyawan-gerilyawan Palestina, yang kemudian bertempur lagi di pihak milisia Muslim.<sup>2</sup>

Pokok sengketa lain yang menjadi semakin penting ialah pembagian kemakmuran yang tidak seimbang. Pada umumnya golongan Kristen menikmati kemakmuran yang lebih besar. Berkat kedudukan mereka yang lebih baik, mereka paling banyak mengambil manfaat dari sukses Beirut dalam usahanya menjadi pusat perdagangan, keuangan, perbankan, turisme dan perhubungan di Timur Tengah. Sebaliknya golongan Muslim umumnya miskin. Dengan pendapatan rendah mereka terpaksa hidup di daerah perkampungan jembel di pinggir kota Beirut, yang tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang wajar. Dalam alam ekonomi liberal yang dianut Libanon, negara kurang berfungsi untuk orang-orang yang lemah kedudukannya; banyak kebijaksanaan yang ditempuhnya lebih menguntungkan golongan yang berada dari pada golongan yang kurang berada. Misalnya sistim perpajakan di mana tidak dikenakan pajak atas keuntungan transaksi milik tanah, biarpun keuntungan itu sangat besar dan membuat banyak orang cepat kaya. Lagi pula banyak terjadi manipulasi pajak di kalangan wajib pajak yang kaya, tidak hanya dengan bantuan penjabat-penjabat pajak tetapi juga dengan pengotahuan Pemerintah. Menurut seorang ahli ekonomi, jika peraturan-peraturan dipatuhi seponuhnya maka pendapatan negara dari pajak-pajak akan 3-4 kali lebih besar. Ekonomi liberal juga

---

<sup>1</sup> Lihat "Land without leaders", Newsweek, 6 Oktober 1975, 18; "A case of Arab against Arab", Newsweek, 28 April 1975, 25.

<sup>2</sup> Lihat W.B. Fisher, "Lebanon", dalam The Middle East and North Africa 1974-1975 (London, 1975), hal. 493-494; "Last rites for a mortally wounded city", Time, 10 Nopember 1975, hal. 24.



berarti bahwa mereka yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat dapat berbuat semau-maunya, termasuk memeras mereka yang lemah, dengan menekan upah tenaga kerja. Pemerintah juga sedikit berbuat untuk memajukan pertanian dan memperbaiki taraf hidup penduduk daerah pedesaan. Sebagai akibatnya banyak orang pindah ke kota-kota, khususnya Beirut, tetapi Pemerintah tidak mempunyai rencana untuk menampung mereka. Maka timbullah perkampungan-perkampungan jembel di pinggir kota, yang tidak mempunyai prasarana fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang memadai. Diperkirakan bahwa sekitar 600.000 orang tinggal di "poverty belt" sekitar Beirut dan menderita kelaparan. Pendapatan mereka sangat rendah sedangkan biaya hidup akhir-akhir ini meningkat secara tajam. Fasilitas-fasilitas sosial juga lebih menguntungkan golongan kaya. Golongan yang miskin umumnya kurang mampu mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi. Mereka juga kurang mampu untuk menikmati fasilitas-fasilitas kesehatan karena umumnya mahal.

Perbedaan-perbedaan itu lebih menyolok dengan adanya gaya hidup mewah golongan kaya. Mereka ini kebanyakan mengikuti pola hidup mewah di negeri-negeri barat yang telah maju dan kaya tanpa memperdulikan bahwa rakyat banyak adalah miskin dan menderita serba kekurangan. Mereka umumnya juga menempati bagian-bagian kota yang eksklusif dan hidup menyendiri, jauh dari rakyat banyak.

Golongan miskin lambat laun menyadari perbedaan-perbedaan itu dan mulai menuntut bagian pendapatan dan kekayaan yang lebih besar, tetapi golongan kaya berusaha mempertahankan kedudukan-kedudukan istimewa mereka. Maka timbullah suatu polarisasi kaya miskin, yang mulai bicara akhir-akhir ini. Rakyat banyak tidak bersedia membiarkan keadaan yang tidak adil itu lebih lama dan semakin meningkatkan tuntutan mereka akan bagian kemakmuran yang lebih besar berupa pendapatan, pendidikan, kesehatan, jaminan-jaminan sosial, prasarana di daerah permukiman mereka dan sebagainya.<sup>1</sup>

#### Polarisasi kekuatan

Dengan demikian terjadilah suatu polarisasi kekuatan. Golongan Muslim yang juga merupakan golongan kurang berada berhadapan dengan golongan Kristen yang berada. Yang pertama

<sup>1</sup> Lihat Eric Rouleau, "Lebanon's absent state", The Guardian, 11 Oktober 1975



mengecam negara sebagai pembela kepentingan golongan kaya dan menuntut suatu perombakan yang mendalam berupa pembaharuan politik dan pembagian kembali pendapatan serta kekayaan. Yang kedua berusaha mempertahankan status quo yang jelas menguntungkan mereka. Dalam songketa ini golongan Muslim mendapat angin dari kaum pengungsi Palestina, khususnya para gerilyawan, yang merasa senasib dan seperjuangan. Seperti kita lihat di atas, golongan Kristen dan Angkatan Bersenjata adalah anti PLO dan berusaha untuk mengendalikan mereka. Pada tahap perang saudara terakhir ini, PLO tidak hanya membantu golongan Muslim dengan senjata tetapi juga melibatkan banyak gerilyawan. Secara demikian golongan Muslim menjadi lebih kuat.

Golongan Kristen melihat perkembangan serupa itu dengan cemas hati dan menuduh golongan Muslim serta gerilyawan-gerilyawan Palestina berkomplotan untuk merombak sistem politik, pemerintahan dan ekonomi Libanon. Mereka memperkuat milisia-milisia Kristen dengan latihan-latihan militer dan pembelian senjata baru. Golongan Muslim menanggapi dengan tindakan-tindakan serupa. Menurut perkiraan Eric Rouleau kini terdapat sekitar 150.000 orang swasta bersenjata dengan 300.000 pucuk senjata, termasuk senjata berat seperti meriam, mortir, roket, panzer dan sebagainya. Sebagai perbandingan dapat dicatat, bahwa Angkatan Bersenjata negara hanya terdiri atas 18.000 orang. Perlombaan senjata yang mulai beberapa tahun yang lalu itu semakin meningkat dan akhirnya memuncak menjadi pertempuran-pertempuran sengit yang berlarut-larut.<sup>1</sup>

### Campur tangan asing

Perang saudara di Libanon ini menjadi lebih parah dan lebih sulit dengan adanya campur tangan asing. Masing-masing pihak mempunyai dukungan di luar negeri. Golongan Kristen menuduh PLO, Suriah, Irak dan Libia membantu golongan Muslim, sedangkan golongan Muslim menuduh Amerika Serikat dan Israel membantu golongan Kristen, untuk melumpuhkan perjuangan rakyat Arab Palestina. Selain itu sementara negara Arab menuduh Israel telah mengobarkan perang saudara di Libanon demi kepentingannya. Tuduhan-tuduhan itu rupanya beralasan, paling tidak untuk sebagian. Yang paling jelas ialah campur tangan organisasi-organisasi gerilya Palestina. Mereka tidak hanya memberikan

<sup>1</sup> Lihat Eric Rouleau, "Reform or revolution", The Guardian, 19 Oktober 1975; "Clashes of private armies in Lebanon's civil war", The Guardian, 4 Oktober 1975



senjata kepada milisia Muslim tetapi juga latihan militer, nasihat dan bimbingan. Bahwa Suriah juga terlibat dapat dilihat bahwa sebagian besar senjata itu didatangkan dari wilayahnya. Rupanya para gerilyawan mempunyai suatu jalan dari Suriah ke Libanon Selatan yang dapat digunakan dengan leluasa untuk mengangkut senjata dan oleh sebab itu disebut "Ho Chi Min trail" di Timur Tengah. Sebaliknya golongan Kristen mendapatkan persenjataannya dari agen-agen di luar negeri dan memasukkannya lewat pantai Libanon yang mereka kuasai. Mereka rupanya juga mendapatkan bantuan senjata dari Amerika Serikat dan Israel yang berkepentingan dengan dipertahankannya perimbangan kekuatan di Libanon. Diberitakan pula bahwa mereka mendapat bantuan dari perwira-perwira Angkatan Bersenjata Libanon. Paling tidak mereka ini membiarkan milisia Kristen memasukkan senjata dari luar negeri.<sup>1</sup>

### Bahaya eskalasi

Perang saudara di Libanon itu karenanya tidak hanya merupakan suatu bencana bagi Libanon, tetapi juga sangat berbahaya bagi keamanan dan perdamaian di seluruh kawasan karena mudah mengobarkan suatu peperangan baru Arab-Israel. Sejauh ini bentrokan terjadi antara milisia Kristen di satu pihak dan milisia Muslim serta gerilyawan-gerilyawan radikal di lain pihak. Angkatan Bersenjata Libanon belum dikerahkan karena tiada sepakat kata dalam kabinet. PM Karani menolak desakan-desakan sementara monteri karena takut pasukan-pasukan akan memihak milisia Kristen. Seperti diketahui kebanyakan perwira adalah Kristen dan sangat anti PLC.

Akan tetapi jika keadaan anarki berlarut-larut atau milisia Kristen dalam bahaya menderita kekalahan yang menentukan, terdapat kemungkinan Angkatan Bersenjata kehilangan kesabaran dan mengambil tindakan sendiri. Kenyataannya banyak perwira sangat bernaafsu untuk ikut bertempur, tidak hanya untuk menghentikan perang saudara, tetapi juga untuk menatahkan kekuatan PLC. Mereka merasa mampu untuk melakukannya dan tahu bahwa banyak pemimpin Libanon, termasuk Presiden Franjich, menginginkan tindakan yang tegas. Tetapi bila Angkatan Bersenjata mengambil tindakan itu, Suriah pasti akan melakukan

<sup>1</sup> Lihat "The battle of Beirut", Newsweek, 10 Nopember 1975; lihat juga Kompas 17 Nopember 1975 yang memuat laporan AP.



intervensi militer dengan mengirimkan pasukan-pasukan Tentara Pembebasan Palestina dan gerilyawan-gerilyawan yang bermukim di wilayahnya ke Libanon seperti terjadi bulan Mei 1973 ketika Angkatan Bersenjata mulai menindas gerilyawan-gerilyawan Palestina. Maka Israel akan melaksanakan ancamannya untuk turun tangan dan mencegah PLO merubah perimbangan kekuatan di Libanon dan secara demikian lebih leluasa melancarkan aksi-aksi terhadapnya. Sebagai akibatnya akan berkobar lagi perang Arab-Israel. Apabila Israel menyerbu Libanon secara besar-besaran, negara-negara Arab lainnya, termasuk Suriah dan Mesir, akan menyerangnya, dan negara-negara Arab penghasil minyak menggunakan senjata minyak lagi dengan mengurangi produksi dan menghentikan pengiriman minyak ke negara-negara yang membantu Israel, terutama Amerika Serikat. Dalam situasi itu kemungkinan besar Amerika Serikat akan melaksanakan ancamannya untuk mengadakan intervensi militer guna mengamankan supply minyak bagi dirinya dan negara-negara sekutunya yang tergantung pada minyak Arab, dan secara demikian mengambil risiko konfrontasi bersenjata dengan Uni Soviet. Pendek kata, perang saudara di Libanon dapat mengobarkan suatu poporangan baru di Timur Tengah.<sup>1</sup>

#### Usaha-usaha perdamaian

Untuk mencegah kemungkinan itu menjadi kenyataan dan untuk menghentikan perang saudara, sejauh ini telah dilakukan serentotan usaha perdamaian, tidak hanya oleh Pemerintah Libanon sendiri, tetapi juga oleh Suriah, Liga Arab, Vatikan dan Perancis. Tetapi semuanya itu sia-sia, Kedua pihak sengketa masih berkeras kepala dan belum mau mengadakan kompromi. Golongan Muslim menuntut perubahan-perubahan politik secara radikal sebagai syarat untuk menghentikan tembak menembak. Golongan Kristen sebaliknya menyatakan bersedia berunding, tetapi hanya setelah Pemerintah Libanon berhasil mengukuhkan kekuasaannya atas seluruh negeri, termasuk atas kamp-kamp gerilyawan Palestina.<sup>2</sup> Untuk mengatasi komacotan itu, pada 8 Nopember PI Karami mengusulkan suatu kompromi,

---

<sup>1</sup> Lihat "Land without leaders", Newsweek, 6 Oktober 1975; lihat juga "The Lebanese powder-keg", Foreign Report, 24 September 1975.

<sup>2</sup> Lihat "The battle of Beirut", Newsweek, 10 Nopember 1975



yaitu Pemerintah akan melibatkan Angkatan Bersenjata untuk mengukuhkan kekuasaan negara sesuai dengan tuntutan golongan Kristen dan sekaligus mengadakan perubahan-perubahan politik sesuai dengan tuntutan Muslim. Dalam rangka itu diusulkan suatu perimbangan kekuasaan baru dan penghapusan sistim pengangkatan pegawai negeri atas dasar ratio konfesional. Golongan Muslim dan golongan Kristen masing-masing akan menduduki separuh kursi dalam parlemen dan kekuasaan Presiden akan dikurangi dalam arti bahwa dia tidak dapat membubarkan parlemen dan mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri, termasuk perdana menteri. Perdana Menteri akan ditunjuk mayoritas dalam parlemen. Mula-mula usul kompromi itu ditolak kedua golongan, oleh golongan Kristen karena memuat perubahan yang terlalu besar, dan oleh golongan Muslim karena perubahannya kurang mendalam. Usul hanya memuat suatu perimbangan baru, dan tidak menghapus dasar konfesional negara yang dilihat sebagai faktor yang paling besar dalam kesulitan-kesulitan yang dialami Libanon.<sup>1</sup>

### Penutup

Kinipun belum ada tanda-tanda bahwa sengketa antar golongan di Libanon akan dapat diatasi dengan segera. Kedua pihak belum bersedia saling memberikan konsesi yang berarti karena masih merasa dapat mempertahankan kedudukannya atau mencapai tuntutanannya sepenuhnya. Sementara penguasa berpendapat bahwa sengketa itu baru akan dapat diselesaikan secara damai setelah masalah Palestina diselesaikan dan sebagai akibatnya campur tangan asing di Libanon berkurang. Banyak tokoh Kristen hanya bersedia berunding dengan golongan Muslim untuk meninjau kembali pembagian kekuasaan setelah gerilyawan-gerilyawan Palestina meninggalkan Libanon atau menghormati kedaulatannya. Sebaliknya, PLO baru akan meninggalkan Libanon setelah terbuka kemungkinan untuk kembali ke Palestina dan mendirikan negara. Sebelum itu tercapai gerilyawan-gerilyawan Palestina akan tinggal di Libanon dan menggunakannya sebagai pangkalan bagi perjuangan mereka melawan Israel. Dalam hal ini mereka mendapatkan dukungan golongan Muslim Libanon dan negara-negara Arab lainnya.

<sup>1</sup> Lihat "Rashid, or little by little", The Economist, 22 Nopember 1975; lihat juga "Again, Christian versus Moslem", Time, 22 September 1975.



## FOSFAT DI SAHARA BARAT

O. Abdul RACHMAN

Akhir-akhir ini di surat-surat kabar, baik di dalam maupun di luar negeri, dikabarkan bahwa Raja Maroko, Hasan II, telah menggerakkan 350.000 penduduk Maroko, diantaranya 30.000 wanita untuk mengadakan "long march" ke wilayah Sahara yang dikuasai Spanyol. Diberitakan bahwa 350.000 orang tadi tidak akan membawa persenjataan, melainkan masing-masing akan membawa sebuah Kitab Suci Al Qur'an, sebagai pertanda bahwa gerakan massal untuk menduduki wilayah Sahara direstui oleh Tuhan Seru Sekalian Alam.

### Sahara Spanyol: Sahara Barat

Wilayah Sahara Spanyol berdiri sebagai hasil perundingan antara dua kekuasaan penjajahan, pada akhir abad XIX dan permulaan abad XX. Pada tahun 1884 Spanyol menduduki Rio de Oro, sekaligus mengklaim kekuasaan atas daerah pantai sampai Cape Blanco. Pada bulan Juni 1900 tercapai persetujuan antara Perancis dan Spanyol mengenai perbatasan antara Mauretania dan Sahara Spanyol, akan tetapi perbatasan antara Sahara Spanyol dan Maroko baru dibicarakan pada konvensi tahun 1904 dan 1912. Sejak 1912, pasukan-pasukan Spanyol memperluas daerah kekuasaannya. Baru sejak tahun 1934 wilayah Sahara Spanyol diatur sebagai daerah Spanyol, yang terdiri dari dua propinsi Ifni dan Sahara Spanyol.

Sejak Maroko menjadi merdeka, pada tahun 1956, wilayah Sahara Spanyol diklaim oleh Maroko. Pasukan-pasukan ireguler Maroko terus menerus melakukan operasi di wilayah Sahara Spanyol, bahkan pada tahun 1957 Ifni diserang oleh pasukan-pasukan gerilya Maroko. Pertempuran-pertempuran sengit terjadi di Tarfaya, Rio de Oro, bahkan dekat Villa Cisneros. Gerakan-gerakan gerilya tadi baru dapat ditertibkan dengan operasi gabungan oleh pasukan Perancis - dari Aljazair dan pasukan Spanyol.

Di samping operasi gerilya, Maroko mengadakan pendekatan diplomatik, baik di PBB, maupun langsung dengan Spanyol. Pada bulan September 1965, delegasi Maroko di PBB berharap agar persoalan Sahara Spanyol dapat diselesaikan dengan cara baik. Pada bulan Desember 1965, PBB mengambil resolusi yang mendesak agar diadakan tindakan-tindakan supaya wilayah Sahara Spanyol menjadi merdeka. Pada tahun 1967 Menlu Maroko pergi ke Madrid untuk membicarakan dekolonisasi wilayah Sahara. Bahkan pada tahun 1970 UN Committee on Trusteeship meminta agar di Sahara Spanyol diadakan referendum untuk memberi kemerdekaan kepada wilayah tadi.

Bukan Maroko saja yang mengadakan klaim terhadap wilayah ini. Mauretania dari Selatan dan Aljazair dari Barat mengklaim juga wilayah Sahara ini. Dari Aljazair bergerak organisasi Morehob-Orang Biru, di samping organisasi Polysariot. Organisasi Front Populaire de Liberation de Sahara bergerak dari Mauretania, sedangkan Maroko membina organisasi Movement de 21Aout.

Bila mempelajari statistik-statistik dari Sahara Spanyol, maka daerahnya seluas 266.000 km persegi, dengan penduduk sebanyak 100.000 jiwa, termasuk 16.648 bangsa Eropah dan 15.000 serdadu Spanyol. Yang lain adalah pengembara yang bergerak antara daerah Maroko, Aljazair dan Mauretania. Hasil produksi terpenting di Sahara Spanyol adalah fosfat, bahan utama untuk pembuatan pupuk. Diperkirakan bahwa wilayah ini mempunyai deposit fosfat sebanyak 1.700 juta ton. Pada tahun 1973 untuk pertama kali fosfat diekspor. Diperkirakan bahwa pada tahun 1975 tiap tahun akan diproduksi 10 juta ton fosfat.

Maroko juga merupakan produsen fosfat. Bahkan, (menurut Time 27 Oktober 1975), Maroko, di luar produksi Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki 60% cadangan fosfat dunia. Bila Sahara Spanyol dapat dikuasai oleh Maroko, maka Maroko akan menguasai 80% fosfat dunia. Sangat menarik perhatian bahwa sejak 1973 harga minyak berlipat ganda, pada tahun itu juga harga fosfat melonjak lima kali; dari US\$ 14 menjadi US\$ 68.



Pendapat itu mungkin benar, paling tidak untuk sebagian. Kenyataannya mereka telah menjadi katalisator perang saudara di Libanon dan terlibat didalamnya, tidak hanya sebagai salah satu pokok sengketa melainkan juga sebagai pihak.

Bagaimanapun juga, sengketa antar golongan di Libanon hanya dapat diselesaikan dengan pembaharuan-pembaharuan politik dan pembagian pendapatan dan kemakmuran nasional secara merata. Libanon lama akan berakhir dan diganti Libanon baru yang lebih adil. Apakah hal itu akan dicapai lewat pembaharuan atau revolusi untuk sebagian besar tergantung pada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin politik Libanon. Tekad kaum miskin untuk mengatasi kesengsaraan mereka yang kelowat berat telah melancarkan suatu pergolakan yang menghancurkan segala sesuatu yang menghambatnya untuk membangun hari depan yang lebih baik. Sementara itu sengketa akan berlangsung terus dan mengobarkan pertempuran-pertempuran yang selalu berbahaya karena dapat meningkat menjadi suatu peperangan baru.

Suatu pelajaran yang dapat ditarik dari pergolakan di Libanon ini ialah bahwa ketidaksamaan yang menyolok antara golongan kaya dan golongan miskin sesama warga negara akan selalu mengandung benih-benih perpecahan dan ketegangan yang dapat menjadi suatu ledakan yang banyak minta korban dan menimbulkan kerusakan-kerusakan serta kerugian yang besar, khususnya bila golongan miskin menyadari sepenuhnya kepincangan sosial itu. Persamaan dan keadilan sosial adalah salah satu aspirasi manusia yang dalam dan kuat. Untuk mencegah terjadinya ledakan itu, maka perlu diusahakan agar ketidaksamaan tidak meningkat tetapi berkurang secara berangsur-angsur. Dengan maksud itu harus diberikan kesempatan yang sama kepada semua untuk ikut serta dalam kehidupan nasional dan mendapatkan bagian pendapatan yang wajar.

Kesimpulan lain ialah bahwa dasar konfesionil untuk kehidupan politik dewasa ini sudah tidak relevan dan mengandung bahaya. Dari sejarah kita tahu bahwa perang agama adalah salah satu yang paling sengit karena masing-masing pihak mengira berjoang untuk Tuhan dan untuk menyelamatkan nilai-nilai yang paling tinggi. Umat Kristen di Libanon melihat perjuangan umat Muslim sebagai ancaman bagi hak-hak dan kebebasan agama mereka, dan oleh sebab itu berjoang mati-matian untuk mempertahankan status quo. Sehubungan

dengan ini dapat disambut dengan gembira bahwa banyak orang Libanon baik Kristen maupun Muslim mulai menyadari bahwa dasar konfesionil negara mereka harus dihapus dan kehidupan politik mereka dipisahkan dari agama serta diatur dengan hukumnya sendiri; khususnya karena masyarakat Libanon bersifat pluralistis, biarpun mereka juga menyadari bahwa hal itu tidak dapat dilaksanakan dalam satu dua hari tanpa perjuangan.



### Faktor-faktor Kontroversial menghambat Dekolonisasi

Proses dekolonisasi Sahara Spanyol pasti akan terjadi. Pada tahun 1974 Spanyol berjanji akan mengadakan referendum pada tahun 1975 agar penduduk-penduduk Sahara Spanyol dapat menyatakan tekad untuk kemudian hari, namun kehendak Spanyol adalah agar Sahara menjadi merdeka dengan ikatan erat dengan Spanyol. Maroko dan juga Mauretania menghendaki agar wilayah ini menjadi wilayah Maroko atau Mauretania. Aljazair menghendaki supaya Sahara Barat menjadi negara merdeka yang sosialis dengan ikatan erat dengan Aljazair.

Maroko dan Mauretania telah mengajukan klaim terhadap wilayah Sahara Spanyol di muka Mahkamah Internasional di Den Haag. Putusan Mahkamah Internasional pada pertengahan Oktober 1975 sangat mengecewakan Maroko dan Mauretania. Maroko, menurut Mahkamah Internasional, memang mempunyai beberapa ikatan-ikatan legal dengan suku-suku Sahara, akan tidak pernah memiliki "kekuasaan teritorial". Begitupun bagi Mauretania ditentukan bahwa memang Mauretania ada ikatan-ikatan geografis akan tetapi tidak mempunyai "kekuasaan teritorial".

Kecewa karena jalan diplomasi melalui PBB, maupun jalan yuridis melalui Mahkamah Internasional, begitupun operasi-operasi gerilya tidak membawa hasil yang memuaskan, maka Raja Hassan II memerintahkan gerakan masal, rakyat Maroko sebanyak 350.000 untuk bergerak ke Sahara Spanyol, yang hanya berpenduduk 100.000 jiwa.

Sebaliknya Spanyol telah mempersiapkan 15.000 tentaranya untuk mempertahankan integritas wilayah Sahara. Aljazairpun sudah mempersiapkan pasukan-pasukan di bagian Barat, pada perbatasan dengan Sahara Spanyol untuk menjaga segala kemungkinan. Mauretania memperlihatkan sikap menunggu, akan tetapi juga siap untuk menguasai daerah Selatan dari wilayah Sahara Spanyol.

Situasi gawat karena ketegangan-ketegangan di sekitar Sahara Barat telah menarik perhatian Dewan Keamanan PBB. Setelah kunjungan Sekjen PBB Kurt Waldheim ke Maroko, Aljazair, Mauretania dan Spanyol pada pertengahan bulan Oktober, pada akhir Oktober Dewan Keamanan mengadakan sidang darurat untuk mendengarkan pendapat empat negara yang ter-sangkut dalam persoalan Sahara Spanyol ini, yang masing-masing mengemukakan pendapat berbeda-beda.



Spanyol memang bersedia untuk memberi kemerdekaan kepada wilayah Sahara Barat. Penyelesaian akan dicari melalui sebuah plebisit. Kepentingan pokok Spanyol adalah agar penghasilan fosfat yang digarap oleh Fosfatos de Bucraa SA, sebuah perusahaan negara Spanyol, tetap mengalir ke Spanyol. Sikap Maroko dengan gerakan masal sangat ditentang, akan tetapi, mengingat pengalaman Portugal dengan perang penjajahannya yang akhirnya mencetuskan semangat kiri di angkatan perangnya, dapat ditarik perkiraan bahwa poranan 15.000 tentara Spanyol dalam menghadapi massa rakyat yang tidak bersenjata, belum tentu sekeras seperti diharapkan.

Aljazair juga menghendaki supaya Sahara Barat menjadi sebuah negara merdeka. Aljazair akan menentang tiap usaha Maroko untuk memasukkan wilayah Sahara Barat dalam kerajaan Maroko. Berkali-kali sudah terdapat persengketaan antara Aljazair dan Maroko mengenai perbatasan-perbatasan di gurun Sahara yang kaya akan mineral. Lebih-lebih lagi Aljazair, baik dulu di bawah Ben Bella, maupun sekarang di bawah Boumedienne, merupakan negara sosialis, yang erat hubungannya dengan Soviet dan Eropah Timur.

Mauretania sebagai negara miskin, memperlihatkan sikap menunggu, akan tetapi siap untuk merebut sebagian dari Sahara, bila operasi Maroko jadi dilaksanakan.

Maroko terdorong oleh beberapa faktor di samping faktor ekonomis.

Di bidang ekonomi, dengan penguasaan terhadap fosfat di Sahara Barat, Maroko akan menguasai 80% dari fosfat bumi, dengan harga yang makin meningkat karena kebutuhan dunia akan pupuk. Sebagai Raja-raja Arab di Saudi dan Iran yang kaya karena minyak, maka Raja Maroko akan kaya karena fosfat.

Di bidang politik, long march yang dramatis itu, menempatkan Raja Hassan II sebagai seorang anti-penjajah, seorang feodal yang dengan nyata melawan penjajahan, berlainan dengan pemimpin-pemimpin lain yang "sosialis" akan tetapi bicara saja.

Ke dalam negeri Raja Hassan II mengharap dukungan rakyat banyak, terutama rakyat yang bergabung dalam organisasi Istiqlal, yang sejak semula mengharapkan berdirinya Maroko Raya, yang terdiri dari Maroko, Mauretania, Sahara Spanyol dan sebagian dari Aljazair Barat. Pemerintahan Raja Hassan II adalah otoriter, yang terdiri dari militer dan teknokrat.



Oposisi dari partai-partai politik termasuk Istiqlal menolak turut serta dalam pemerintahan Raja.

Waktu pada tahun 1962 Aljazair memperoleh persenjataan dari Uni Soviet, Maroko mendapat persenjataan dari Amerika Serikat. Kondisi perang dingin demikian masih terbayang sekarang dalam hal Sahara Barat, Maroko khawatir bahwa Aljazair dapat mempengaruhi Sahara Barat merdeka, sehingga Maroko dapat terbelah antara dua negara "sosialis".

### Penutup

Waktu pada abad XIX negara-negara penjajah membagi-bagi benua Afrika menurut kehendak sendiri, tanpa memperhatikan ikatan-ikatan ethnologis ekonomis atau kesejahteraan, maka sekarang dalam fase dekolonisasi faktor-faktor lama tadi timbul kembali, diperkuat dengan faktor-faktor ekonomis dan politik kekuatan antara bangsa-bangsa yang baru merdeka. Rupanya kesedihan yang timbul karena penjajahan belum dapat hilang dalam alam merdeka. Sahara Barat, yang pernah dibagi-bagi antara Spanyol dan Perancis, dalam fase dekolonisasi sekarang menghadapi hari depan yang gelap. Dapatkah penduduk-penduduk Sahara Barat menyusun kesadaran kebangsaan, dalam menghadapi campur tangan dari segala pihak? Seperti minyak sudah menjadi faktor power politics dunia, begitupun fosfat merupakan unsur power politics, karena kebutuhan akan pupuk, terutama oleh negara-negara berkembang.

Dapat diperkirakan bahwa hari depan Sahara Barat cukup kritis. Seandainya Sahara Barat diduduki oleh Maroko dan Mauretania, pasti suku-suku yang setia kepada Aljazair akan bergerak sebagai gerilya pembebasan, dengan bantuan dari Aljazair dan dari Blok Timur. Seandainya Sahara Barat menjadi merdeka, pasti suku-suku gerilya dari Maroko dan Mauretania akan bergerak dengan bantuan dari kedua negara tadi, ditambah dengan bantuan negara-negara Barat. Fosfat yang berharga itu, rupanya tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sendiri, karena fosfat telah menjadi unsur kepentingan global.





## BANGLADESH: NEGERI ORANG BENGALI

O. Abdul RACHMAN

Pergolakan-pergolakan yang terjadi di Bangladesh, jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan pada tahun 1971 sampai waktu sekarang, perlu dilihat sebagai lanjutan proses dekolonisasi di Semenanjung India yang dimulai setelah Perang Dunia II.

Pemerintah Inggris ke luar sebagai salah satu pemenang dalam perang menghancurkan Jerman Nazi dan Jepang, namun kekuatan Inggris sudah sangat berkurang. Pemerintah baru Inggris pada tahun 1945 adalah pemerintah buruh yang memang bersedia memberi kemerdekaan kepada jajahan-jajahan di Semenanjung India.

Perkembangan dekolonisasi tersebut menghasilkan dua negara merdeka: India sebagai hasil perjuangan Congress di bawah pimpinan Gandhi, Nehru dan tokoh-tokoh lain yang berjiwa sekuler, demokratis dan sosialis. Pakistan sebuah Republik Islam, di bawah pimpinan Mohammad Ali Jinnah serta tokoh-tokoh yang otokratis, dogmatis dalam Islam dan konservatif.

Pembagian Semenanjung India menurut pilihan agama itu tidak memperhatikan unsur-unsur suku, bahasa, perekonomian dan integritas geografis. Pakistan terdiri dari dua propinsi: Pakistan Barat yang terletak antara India Pakistan dan Iran; Pakistan Timur yang berbatasan dengan India dan Birma. Antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat terbentang wilayah India sepanjang 1000 mil.

Sejak tahun 1947, waktu Inggris meninggalkan Semenanjung India, hubungan regional dijiwai oleh pertentangan antara India dan Pakistan, sementara itu faktor-faktor luar regio yang tumbuh sebagai akibat adanya perang dingin dan dipengaruhi oleh kepentingan strategis segitiga antara Amerika Serikat, Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, memperbesar ketegangan di dalam hubungan antara India dan Pakistan.

### Kurang Mantapnya Pakistan

Walaupun mayoritas penduduk Pakistan beragama Islam, namun konstelasi negara yang terdiri dari Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang terpisah oleh wilayah India sepanjang 1000 mil, sudah merupakan kerawanan dari dalam di dalam integritas negara.

Pakistan Timur, yang sekarang menjadi Bangladesh, secara geografis merupakan bagian dari Asia Tenggara sedangkan Pakistan Barat adalah bagian dari Asia Selatan. Iklim berbeda, adat istiadat dan bahasa berlainan, kebudayaan berbeda dan akhirnya juga pandangan politik. Pergolakan di Pakistan Timur untuk memperjuangkan identitas terhadap minoritas yang berkuasa di Pakistan Barat, dimulai pada tahun-tahun 1952-1953 ketika penduduk-penduduk Pakistan Timur dengan sukses memperjuangkan bahasa Bengali sebagai bahasa nasional di samping bahasa Urdu.

Waktu Pakistan menjadi anggota SEATO, Pakistan Timur menolak, sehingga pemerintah Pusat Pakistan menetapkan Jendral Ayub Khan menjadi Gubernur Militer di Pakistan Timur.

Bidang ekonomi merupakan satu faktor utama yang mengakibatkan kurang mantapnya integritas. Penghasilan Pakistan Timur dengan penduduk sebanyak delapan puluh juta, yang menghasilkan juta, yang akhirnya diolah di Pakistan Barat, untuk kepentingan Pakistan Barat yang berpenduduk sebanyak lima puluh juta, merupakan faktor utama di dalam rawannya integritas negara Pakistan. Akibat-akibat serius di bidang ekonomi setelah perang India-Pakistan pada tahun 1965 meningkatkan rasa tidak puas di Pakistan Timur.

Tidak stabilnya kondisi politik sejak tahun 1954, akhirnya menimbulkan pemerintahan militer di bawah Jendral Ayub Khan. Baru pada tahun 1971 kembali seorang sipil Zulfikar Ali Bhutto memegang pimpinan Pakistan.

### Lahirnya Bangladesh

Perjuangan bangsa Bengali di Pakistan Timur dipimpin oleh organisasi Liga Awami di bawah Sheik Mujibur Rahman. Walaupun Sheik Mujibur berkali-kali ditangkap oleh penguasa-penguasa Pakistan, namun pada pemilihan umum Liga Awami menang.



Dalam menghadapi National Assembly, Sheik Mujibur Rächman menuntut otonomi untuk Pakistan Timur. Perundingan dengan Presiden Pakistan Yahya Khan tidak membawa hasil, bahkan angkatan darat Pakistan melakukan operasi penertiban keamanan di Pakistan Timur.

Pada bulan Maret 1971 Republik Rakyat Bangladesh diproklamasikan Sheik Mujibur ditangkap kembali. Perang saudara terjadi, mula-mula antara pasukan Angkatan Darat Pakistan menghadapi pasukan-pasukan gerilya. Akan tetapi dengan meningkatnya jumlah pasukan Pakistan di Pakistan Timur, sejak Desember 1971 India secara terbuka mengadakan invasi ke Pakistan Timur sambil mengakui secara resmi pemerintahan Republik Rakyat Bangladesh.

Kegagalan tentara Pakistan untuk mempertahankan Pakistan Timur telah berakibat bahwa pemerintah Yahya Khan digantikan oleh Zulfikar Ali Bhutto. Sheik Mujibur Rachman dibebaskan dan kembali ke Dacca menjadi Perdana Menteri.

Sejak berdirinya Bangladesh, yang segera memperoleh pengakuan dari berbagai negara, maka di dalam hubungan segitiga antara Pakistan, India dan Bangladesh, Pakistan sejak tahun 1972 harus berhadapan dengan dua negara: India dan Bangladesh, yang keduanya sangat erat berhubungan. Pada tahun 1974 Pakistan mengakui Bangladesh. Tawanan perang dikembalikan. Perundingan-perundingan dimulai untuk menormalisasikan keadaan.

Sejak lahirnya, Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh terus harus menghadapi bencana-bencana alam yang tiada henti-hentinya, misalnya saja adanya cyclone, yaitu badai tropis yang menghancurkan panen padi. Pada tahun 1974 terjadi bencana kelaparan, karena gagalnya produksi jute dan padi. Pada bulan Agustus 1974 terjadi banjir yang melanda sebagian daerah-daerah luas. Sebenarnya tanah Bangladesh subur sekali, akan tetapi kombinasi bencana alam yang tidak kunjung berhenti, kehancuran-kehancuran karena perang kemerdekaan, ditambah dengan eksplosi penduduk (lebih dari 3%) telah merubah sikap Sheik Mujibur Rachman dari seorang pemimpin yang demokratis menjadi pemimpin yang otoriter. Bantuan luar negeri yang diperoleh ternyata hilang di kalangan pejabat-pejabat di sekitar Sheik Mujibur Rachman. Sementara itu angka statistik ekspor-impor menunjukkan defisit yang makin lama makin membesar.



Dengan berakhirnya perang pada permulaan bulan Januari 1972, kehidupan politik yang tadinya didominasi oleh Liga Awami di bawah Shoik Mujibur, diganti dan ditandai dengan timbulnya bermacam-macam partai politik, yang tidak segan-segan mengadakan tindakan teror, seperti misalnya National Socialist Party, Golongan Muslim sayap kanan yang menentang pemisahan dari Pakistan Barat, dan sayap pro-PRC dari National Awami Party. Di samping itu terdapat enam Partai Muslim yang mengadakan kooperasi dengan golongan-golongan Naxalis di Bengala Barat di wilayah India.

Pada tahun 1973 Liga Awami mengadakan koalisi dengan Partai Komunis dan dengan sayap pro-Moskwa dari National Awami Party. Bekas pejuang-pejuang gerilya Rakhi Bahani sejumlah 25.000 orang dengan persenjataan ringan, setia kepada Sheik Mujibur Rahman, dan tetap dipelihara untuk membantu polisi.

Penderitaan rakyat pada tahun 1974 akibat bencana alam dan gagalnya panen, menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban di seluruh negara. Pada bulan Desember 1974 keadaan darurat diumumkan dan angkatan darat diperintahkan memulihkan ketertiban. Pada bulan Januari 1975 UUD dirubah, dengan memusatkan segala kekuatan eksekutif di tangan Presiden. Pada waktu itu Shoik Mujibur Rahman dipilih menjadi Presiden. Untuk mengatasi kekacauan di bidang politik, Presiden Mujibur Rahman membentuk satu National Party, dengan menghapuskan partai-partai lain.

Angkatan perang Bangladesh terdiri dari 5 Brigade Infanteri dengan 17 Batalyon, 1 Resimen Pansor dan 3 Batalyon Zoni. Angkatan Lautnya terdiri dari 3 kapal patroli. Angkatan Udara memiliki 18 pesawat tempur. Di samping organisasi militer yang lama terdapat sebuah National Defence Force, terdiri dari 6.000 orang, dan organisasi Rakhi Bahani dengan kekuatan 25.000 orang.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Shoik Mujibur akhirnya meluas di kalangan angkatan darat. Pada tanggal 15 Agustus 1975, beberapa perwira muda mengadakan kup terhadap pemerintah. Shoik Mujibur beserta keluarga dan orang-orang lain dibunuh. Beberapa menteri ditangkap dengan tuduhan mengadakan korupsi. Sebagai presiden diangkat Khondakar Mustique Ahmed, seorang pengacara yang terkenal karena pandangannya yang anti-komunis, yang tidak segan-segan menyatakan tidak senang dengan India dan dengan Uni Soviet. Sebagai tindakan pertama, Presiden Ahmed



merobah Bangladosh menjadi Republik Islam Bangladesh. Di dalam pidato-pidato pertamanya, Presiden Ahmed menggaris bawahi ciri-ciri Islam dan tradisi penduduk Bangladosh.

Perubahan pemerintahan di Bangladesh disambut dengan gembira oleh Pakistan, yang segera mengakui Pemerintah Republik Islam Bangladesh. Arab Saudi segera memberikan pengakuan. Dengan RRC ditandatangani persetujuan pembukaan hubungan diplomatik pada tanggal 4 Oktober di PBB.

Pemerintah Presiden Khondakar Ahmed jelas merubah im-bangan strategi segitiga di semenanjung itu. Eila di bawah Sheik Mujibur im-bangan segitiga menguntungkan India; maka di bawah pemerintah Republik Islam Bangladesh, im-bangan segi-tiga menjadi merugikan India.

Walaupun Presiden Ahmed berhasil merubah haluan politik Bangladesh, namun penderitaan rakyat tidak dapat diatasi. Pada tanggal 3 Nopember 1975 timbul lagi kup yang mengusir perwira-perwira muda yang menjalankan kup Agustus. Tampil ke muka pada kup Nopember ini perwira-perwira senior. Presiden Ahmed digantikan dengan Presiden Sayem, Ketua Mahkamah Agung, yang tidak pernah berpengalaman politik. Sementara itu tampil orang-orang kuat dari angkatan darat. Mula-mula disebut nama Brigjen Khaled Mosharaf; tetapi beberapa jam setelah Presiden Sayem dilantik, tampil ke muka Mayor Jendral Ziaur Rahman, yang menyatakan bahwa ia terpaksa mengambil alih kekuasaan karena didesak oleh tentara, angkatan laut, polisi dan golongan rakyat. Satu hari kemudian tersiar lagi kabar bahwa Presiden Sayem masih tetap merupakan Presiden dan akan memerintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Perang.

Bertepatan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Bangladesh antara bulan Agustus dan Nopember itu, di India terjadi krisis politik yang membuat India harus memusatkan perhatian ke dalam negerinya sendiri. Sejak tanggal 26 Juli, Perdana Menteri India Gandhi mengumumkan keadaan darurat di India; karena oposisi makin mendesak supaya Indira Gandhi mundur sebagai Perdana Menteri. Alasan yang dipergunakan adalah Keputusan Mahkamah bahwa Indira Gandhi dalam pemilihan umum tahun 1971 telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum negara.

Oposisi makin meningkat. Tanggal 26 Juli dengan dasar keadaan darurat, alat-alat keamanan India sibuk mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap oposisi. India yang tadinya



terkenal sebagai demokrasi terbesar di dunia, berubah menjadi negara yang diatur dengan kekuasaan darurat. Banyak sekali kritik dilancarkan terhadap tindakan Indira Gandhi, namun seperti juga di Filipina, emergency law membawa ofisiensi.

Pada akhir bulan Oktober, Mahkamah Agung membebaskan Indira Gandhi dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya pada bulan Juli yang lalu. Dengan persoalan dalam negeri menjadi lebih terang, maka sangat menarik perhatian bahwa pada bulan Nopember 1975, terjadi kontrakup di Bangladesh, oleh perwira-perwira senior yang lebih bersimpati terhadap India.

### Penutup

Lahirnya Bangladesh sebagai negara merdeka pada tahun 1971, terjadi dengan pertempuran-pertempuran. Mula-mula dalam bentuk perang saudara, kemudian menjadi pertempuran konvensional antara tentara India dengan tentara Pakistan. Kup dan kontrakup pada bulan Agustus dan Nopember 1975 dibarongi juga dengan pembunuhan-pembunuhan, walaupun pada kup dan kontrakup, pembunuhan terjadi di kalangan pemimpin-pemimpin atas.

Sementara itu rakyat Bangladesh yang berjumlah 80 juta manusia melanjutkan hidup dan penderitaan di desa-desa, sepanjang sungai-sungai yang sering meluap, di bawah ancaman badai-badai tropis yang pasti datang antara bulan Juni dan September tiap tahunnya.

Bila diperhatikan kedudukan strategis Bangladesh, sukar diketemukan kepentingan strategis yang berupa mineral-mineral atau sumber-sumber lainnya. Penghasilan jute dan beras juga tidak merupakan nilai strategis positif, bahkan bertambahnya penduduk dengan 3% lebih setahunnya akan selalu memerlukan impor beras, hal mana menjadi nilai strategis negatif.

Perkiraan mengenai nilai strategis Bangladesh hanya dapat dilihat dalam imbangan kekuatan-kekuatan di semonang itu: Imbangan antara Pakistan dan India. Imbangan segitiga antara India, Pakistan dan Bangladesh, hanya dapat diterima oleh India, apabila di dalam segitiga itu India tetap merupakan faktor dominan.



Segitiga regional tadi perlu dipelajari juga di bawah spektrum segitiga strategi global, antara Amerika Serikat, Uni Soviet dan RRC. Dengan berobahnya perang dingin, dengan adanya segitiga global, maka hubungan-hubungan luar negeri menunjukkan konstelasi sebagai berikut: politik non blok India berhubungan erat dengan Soviet. Politik Pakistan memelihara hubungan baik dengan Amerika Serikat dan RRC.

Dapat diperkirakan bahwa pergolakan-pergolakan di Bangladesh belum berhenti. Walaupun India ingin memeliharaimbangan segitiga menurut seleranya, sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa Bangladesh ingin melanjutkan mencari identitasnya, baik terhadap tetangga dekatnya maupun terhadap skenario dunia.

Bangsa Bangladesh sudah berpengalaman bahwa hidup di dalam lingkungan Republik Islam Pakistan menimbulkan tekanan dari minoritas di Pakistan Barat. Terbentuknya Republik Rakyat Bangladesh di bawah naungan India pun tidak membawa perbaikan. Begitu pula kup dan kontrakup yang hanya merobah kecenderungan politik.

Pemantapan Bangladesh hanya akan tercapai, bila bangsa ini dapat menemukan kombinasi seimbang antara keterampilan teknologi, yang harus didatangkan dari luar dengan kegairahan tekad membangun bangsa Bengali yang berkebudayaan tinggi. Sangat menarik untuk memperdalam penelitian terhadap perkembangan strategis di Bangladesh.





## BENTENG PUTIH DI AFRIKA, DETENTE ATAU DETENSI?

O. Abdul RACHMAN

Proses dekolonisasi daerah-daerah jajahan Portugal, terutama di Mozambique dan Angola, telah menimbulkan perubahan imbalanced strategis di Afrika, khususnya di kawasan Afrika bagian selatan.

Konsep Strategis Afrika Selatan semula bertujuan agar Afrika Selatan, Rhodesia, Mozambique dan Angola, yaitu empat negara di Afrika di mana minoritas kulit putih memegang kekuasaan, dapat membentuk kerjasama regional, baik di bidang ekonomi, politik dan militer. Sebelum proses dekolonisasi dilancarkan oleh Portugal, yaitu sampai dengan awal tahun 1974, satuan-satuan bersenjata Afrika Selatan telah beroperasi di Rhodesia, Mozambique dan Angola untuk menghadapi kegiatan gerilya gerakan-gerakan pembebasan di daerah tersebut, dan bahkan modal Afrika Selatan telah banyak pula ditanamkan di ketiga negara itu.

Di bidang politik, terutama sejak tahun 1948 pada waktu Nationale Partij mulai berkuasa, strategi Afrika Selatan didasarkan kepada dua unsur: (1) menolak campur-tangan asing mengenai perkembangan dalam negeri; (2) menempatkan diri ke dalam kelompok negara-negara barat. Menolak campur-tangan asing mengenai perkembangan dalam negeri adalah merupakan sikap dan usaha untuk bertahan terhadap tentangan opini dunia, khususnya bangsa-bangsa di Afrika, yang mengutuk sistem Apartheid yang berlaku di Afrika Selatan. Penempatan diri ke dalam kelompok negara-negara barat merupakan akibat dari kenyataan bahwa minoritas kulit putih yang berkuasa adalah keturunan dari Eropa Barat. Yang menjadi alat diplomasi yang ditonjolkan - sejak permulaan perang dingin tahun 1948 - adalah kekayaan alam mineral, potensi dan fasilitas penanaman modal serta perdagangan, Tanjung Harapan sebagai unsur strategis dalam menghadapi penetrasi dan infiltrasi komunisme di benua Afrika dan unsur strategis dalam route pelayaran, terutama pada waktu Terusan Suez ditutup.



Berlainan dengan perkembangan yang terdapat di Eropa yang memungkinkan adanya "Detente", karena pemerintah negara-negara di Eropa Barat menyadari bahwa tidak dapat lagi menghadapi Blok Timur dengan cara-cara yang berlaku pada waktu perang dingin. penguasa-penguasa di Afrika Selatan tetap berpegang pada pola dan prinsip-prinsip anti-komunis seperti yang lazim berlaku pada masa perang dingin. Kondisi mental demikian, yang tidak mengonai "kekonyalan", disebabkan oleh karena masyarakat di Afrika Selatan tidak mempunyai keagairahan kehidupan politik seperti yang berlaku di Eropa Barat dan Amerika, dan juga karena baik kekuatan politik yang tergabung dalam Nationale Partij maupun United Party sama-sama mempunyai kepentingan agar minoritas kulit-putih tetap berkuasa, artinya tetap mempertahankan sistim Apartheid.

Namun perkembangan yang terjadi di Mozambique dan Angola, sebagai akibat dari mundurnya minoritas kulit-putih - Portugal dan keberhasilan aksi-aksi gerilya gerakan pembebasan Afrika, telah memaksa Afrika Selatan untuk memilih di antara dua kemungkinan, yaitu: (1) Mempertahankan konsepsi strategis mengonai kerjasama regional di Afrika bagian selatan dengan mengadakan intervensi, artinya memilih jalan peperangan. Atau (2) menerima kenyataan bahwa akan timbul dua negara tetangga dengan pemerintahan Afrika Hitam, sambil mengadakan pendekatan-pendekatan dengan menawarkan bantuan ekonomi dan teknis kepada negara-negara Afrika lainnya atas dasar potensi ekonomi Afrika Selatan yang berlimpah-limpah.

PE Afrika Selatan John Vorster di depan Senat Afrika Selatan pada tanggal 23 Oktober 1974 menyatakan, bahwa eskalasi ketegangan atau konfrontasi terhadap Afrika Hitam akan merupakan beban yang terlampau berat, karena itu Afrika Selatan akan mencari jalan akomodasi atau "ko-eksistensi damai" dengan negara-negara Afrika Hitam. Dan memang pendekatan untuk itu sebelumnya telah dilakukannya, bukan saja dengan negara-negara seperti Ivory Coast, Senegal, Gabon, akan tetapi juga dengan Zambia yang merupakan "negara antagonis" Afrika Selatan. Namun masih terdapat 3 faktor penghambat utama dalam strategi akomodasi Afrika Selatan terhadap negara-negara Afrika Hitam, yaitu: (1) Adanya bantuan ekonomi dan militer Afrika Selatan kepada Rhodesia; (2) Penguasaan Afrika Selatan atas Namibia, walaupun PBB telah memutuskan agar Namibia diserahkan kepada PBB untuk mendapatkan kemerdekaannya; dan ke (3) Perkembangan dalam negeri Afrika Selatan sendiri dengan sistim Apartheid-nya.



## Motivasi Afrika Selatan

Dengan menolak jalan perang sebagai penyelesaian dan memilih akomodasi-koeksistensi, maka PM Vorster telah memilih jalan damai. Untuk itu Vorster telah menganjurkan pemerintah Rhodesia agar mengadakan dialog dengan pemimpin-pemimpin gerakan kemerdekaan, dan kepada Namibia telah dijanjikan penyelenggaraan "Konferensi Meja Bundar" semua wakil-wakil golongan di Namibia untuk menyusun sebuah konstitusi; dan ke dalam negeri sendiri Vorster menjanjikan akan adanya perubahan-perubahan untuk memberikan lebih banyak ruang-gerak bagi mayoritas kulit hitam. Bahkan dalam pidatonya di Transvaal tanggal 4 Nopember 1974, Vorster mengatakan bahwa dalam waktu enam bulan berikutnya banyak perubahan yang akan nampak. Namun sudah setahun ucapan tersebut berlalu, belum juga nampak adanya perubahan-perubahan yang dijanjikan.

Dapat diperkirakan, bahwa motivasi Afrika Selatan dalam menjalankan kebijakan akomodasi-koeksistensi atau "detente" ala Afrika Selatan sekarang ini adalah usaha mempertahankan kepentingan nasionalnya, menjamin kelangsungan hidup Afrika Selatan dalam bentuk dan ciri-ciri yang berlaku sekarang. Bila semula konsepsinya adalah membentuk sebuah "benteng putih" yang terdiri dari Angola, Mozambique, Rhodesia dan Afrika Selatan, maka sekarang strategi yang ditempuh adalah memperkuat dan mempertahankan benteng Afrika Selatan melalui pengembangan potensi ekonomi dan militer.

Secara strategis militer, kebijakan yang ditempuh Vorster adalah memperpendek garis pertahanan yang tadinya meluas sepanjang perbatasan dengan Tanzania, Zambia, Zaire dan Congo, sekarang dirubah dan dibatasi untuk menghadapi Mozambique, Zambia dan Angola.

Di bidang ekonomi, Afrika Selatan mengusahakan untuk dapat memanfaatkan pasaran-pasaran baru di benua Afrika untuk hasil industri maupun melalui usaha bantuan ekonomi dan teknis. Dengan melalui cara akomodasi ini diharapkan Afrika Selatan masih dapat menjamin penyediaan tenaga kerja dari negara-negara tetangganya terutama untuk kegiatan pertambangan dan perindustriannya.

Di bidang politik, Afrika Selatan mengharapkan dapat melunakkan sikap negara-negara Afrika khususnya ataupun negara-negara lain di dunia melalui forum resmi, ataupun melalui

kegiatan-kegiatan lain, seperti olah raga, untuk dapat merubah image Afrika Selatan yang terkutuk karena sistim Apartheid-nya.

### Kekuatan ekonomi Afrika Selatan

Afrika Selatan merupakan negara yang memiliki potensi besar sebagai penghasil bahan-bahan pertambangan seperti chrome, platinum, manganese, biji besi, coal, uranium, asbestos, copper, dan fluorspar. Sebagai gambaran dapat dikemukakan di sini, bahwa 92% cadangan dunia akan chrome, yaitu kira-kira sebesar 10 milyar metrik ton, dimiliki oleh Afrika Selatan. Jepang pada tahun 1971 mengimpor sebanyak 719.649 metrik ton chrome dan pada tahun 1972 sebanyak 442.263 metrik ton. Platinum yang diperlukan sebagai katalis dalam usaha-usaha anti polusi, pengolahan minyak dan fertilizer dimiliki Afrika Selatan sebanyak 86% cadangan dunia. 68% dari cadangan dunia akan manganese, yang sangat diperlukan dalam proses pembuatan baja, terdapat di Afrika Selatan. Sedangkan biji besi (iron ore), walaupun hanya 7% dari cadangan dunia yang dimiliki Afrika Selatan, merupakan bahan ekspor yang cukup laku, karena biji besi Afrika Selatan berkualitas tinggi. Diperkirakan bahwa 25% cadangan dunia akan uranium dimiliki Afrika Selatan dan produksi emas Afrika Selatan hanya dapat dibandingkan dengan produksi yang dipunyai Uni Soviet. Begitu pula dengan ekspor batubara, garis statistik menunjukkan adanya kenaikan yang cukup meyakinkan, karena harga batubara Afrika Selatan relatif murah, misalnya apabila dibandingkan dengan harga batubara Australia.

Statistik berikut mengenai hasil bahan-bahan pertambangan pada tahun 1969-1970 kiranya akan dapat memberikan gambaran lebih jelas:



TABEL 1

AFRIKA SELATAN : PERTAMBANGAN <sup>+</sup> (Rand '000)					
	1966	1967	1968	1969	1970
Gold	775,753	763,327	777,532	779,417	805,412
Uranium	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Silver	2,922	3,506	5,000	4,346	4,343
Iron Ore	19,262	23,117	29,536	27,610	28,654
Copper	92,161	97,723	99,427	114,746	137,657
Manganese Ore	24,174	23,868	23,559	25,374	26,100
Chrome Ore	7,717	7,682	8,913	9,706	10,546
Tin (metal concentrates)	4,286	3,921	4,078	4,293	3,418
Coal	79,697	85,908	97,283	106,082	115,998
Asbestos	28,712	26,469	31,714	30,881	33,567
Diamonds	62,097	57,440	71,599	96,571	n.a.
Lime and Limestone	11,871	12,767	13,610	15,295	17,165

<sup>+</sup> Survey Statistik, 1 Rand = Rp. 450,-)

TABEL 2

AFRIKA SELATAN : PRODUKSI MINERAL ('000 metric tons)		
	1969	1970
Antimony	29.6	28.8
Asbestos	258.1	287.4
Chrome	1,197.4	1,427.3
Coal	52,741.5	56,611.7
Copper	126.2	149.2
Fluorspar	150.2	173.0
Iron Ore	8,785.9	9,272.0
Manganese	2,642.7	3,053.5
Phosphates, Crude	1,678.2	1,684.9
Vanadium	4.6	4.3
Diamonds (metric carats)	7,862.8	8,111.5
Gold (kg.)	973.0	1,000.4

Di sektor industri pun terdapat perkembangan yang cukup pesat. Di samping dihasilkan bahan-bahan konsumsi, industrinya juga memproduksi mesin-mesin, alat-alat elektronis, kimia dan sebagainya yang juga diekspor ke negara-negara industri seperti Jepang.

TABEL 3

## AFRIKA SELATAN : INDUSTRI (Rand '000)

	1967	1968	1969
Processed Foodstuffs	930,899	990,791	994,417
Beverages and Tobacco	348,252	373,381	392,084
Textiles	298,727	297,596	357,964
Clothing and Knitted Products	226,044	229,852	236,997
Footwear	84,770	87,272	84,658
Wood and Wood Products	88,792	96,961	118,281
Furniture	104,505	117,959	125,282
Paper and Paper Products	204,350	218,904	234,232
Printing, Publishing and Allied Industries	117,521	130,822	168,584
Leather and Leather Products	28,308	28,058	36,286
Rubber Products	102,015	107,362	134,576
Chemicals and Chemical Products	469,559	500,540	498,211
Non-metallic Mineral Products	227,595	240,992	307,662
Basic Iron and Steel Products	312,622	322,371	416,930
Basic Non-ferrous Metals	100,324	108,695	152,444
Metal Products	546,787	639,506	506,159
Machinery (except Electrical Machinery)	292,701	308,539	312,697
Electrical Machinery and Equipment	337,510	377,708	265,181
Railroad Equipment	81,704	70,977	43,679
Motor Vehicles	275,792	289,025	338,791

Bila tidak ada faktor-faktor lain yang menghambat, maka diperkirakan bahwa Afrika Selatan yang telah memiliki pendapatan nasional sebesar 20% dari seluruh pendapatan nasional negara-negara di benua Afrika, akan berkembang menjadi negara raksasa di bidang ekonomi setingkat dengan negara-negara industri di Eropa Barat. Afrika Selatan akan menjadi negara anggota dunia industri dan partner sejati negara-negara di Eropa Barat, Amerika dan Jepang.

Peningkatan di bidang pertambangan dan industri tersebut membutuhkan penambahan tenaga kerja pula. Mayoritas tenaga kerja terdiri dari buruh kulit hitam yang umumnya adalah pekerja kasar sedangkan sektor manajemen dan eselon tinggi lainnya sepenuhnya dikuasai oleh karyawan kulit putih.

Dari jumlah buruh-buruh hitam yang ada, hanya kurang dari seperempatnya berasal dari Afrika Selatan sendiri, sedangkan selebihnya yang merupakan mayoritas didatangkan dari Botswana, Swaziland, Lesotho, Malawi, Mozambique dan Angola. Sebagai hasil dari transfer buruh yang bekerja di Afrika Selatan, Botswana memperoleh sekitar 25% dari GNP-nya,



begitu pula halnya dengan Swaziland. Bahkan 70% dari GNP Lesotho didapatkan dari upah buruh yang bekerja di Afrika Selatan. Sekitar 100 ribu buruh Mozambique mendapatkan pekerjaannya di Afrika Selatan sebelum Mozambique merdeka. Begitu pula halnya dengan Malawi, sejumlah kurang lebih 30% dari jumlah pekerja yang bekerja di sektor pertambangan di Afrika Selatan merupakan "sumbangan" dari Malawi.

Dari gambaran penggunaan tenaga kerja hitam di atas dapat dilihat dengan jelas betapa saling ketergantungan yang ada di antara Afrika Selatan yang membutuhkan tenaga kerja dan negara-negara Afrika lain yang membutuhkan tempat bekerja untuk mendapatkan penghasilannya.

Seperti halnya dengan daerah Bantustan -- wilayah khusus di Afrika Selatan untuk penduduk kulit hitam -- infra-struktur seperti pos, komunikasi perhubungan, bea-cukai dan mata uang (Rand) dari negara-negara merdeka disekitarnya seperti Botswana, Lesotho dan Swaziland praktis sepenuhnya dikuasai oleh Afrika Selatan.

Penghasilan intan Lesotho dan Namibia sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Afrika Selatan. Bendungan-bendungan raksasa yang menghasilkan tenaga listrik di Mozambique, Lesotho dan Namibia didirikan dengan modal Afrika Selatan, dan dipergunakan untuk industri Afrika Selatan. Sejak diproklamákannya Rhodesia sebagai negara merdeka pada tanggal 11 Nopember 1965, Afrika Selatan telah menanamkan modalnya sebesar US\$ 1 milyar, di samping itu Afrika Selatan juga merupakan partner dagang utama, baik untuk Rhodesia maupun Malawi. Mayoritas saham-saham perusahaan kereta api Benguala, perusahaan minyak, industri intan dan bank-bank di Angola dikuasai oleh modal Afrika Selatan.

Kesemuanya itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh kekuatan ekonomi Afrika Selatan atas negara-negara disekitarnya. Dan oleh karena itu pula pemerintah Afrika Selatan dipaksa untuk menyesuaikan strateginya menghadapi hasil-hasil gemilang gerakan-gerakan kemerdekaan di Guinea dan Mozambique yang dikhawatirkan akan memberikan dorongan kepada gerakan-gerakan kemerdekaan di wilayah-wilayah disekitarnya yang masih belum merdeka.



## Negara-negara Afrika di lingkungan Afrika Selatan

### 1. Malawi

Presiden Malawi, Dr. Hastings Banda, lama sebelumnya telah menyetujui adanya kerjasama dengan Afrika Selatan, bahkan pada tahun 1967 telah diadakan perjanjian perdagangan dan pada tahun 1971 Presiden Banda berkunjung ke Afrika Selatan. Dalam kunjungan itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika Selatan memberikan penghormatan kepada seorang kulit hitam sederajat dengan upacara yang diberikan kepada tamu-tamu berkulit putih. Namun sejak tahun 1972, dengan keberhasilan yang dicapai oleh aksi-aksi operasi Frelimo di Mozambique, maka Presiden Banda merubah sikapnya. Perlu diperhatikan, bahwa para gerilyawan Frelimo dalam operasinya di propinsi Tete di Mozambique dari pangkalannya di Zambia dan Tanzania selalu bergerak melintasi wilayah Malawi. Keberhasilan Frelimo untuk melodakkan jalan kereta api di Mozambique telah memaksa perubahan sikap Malawi yang pro Afrika Selatan.

### 2. Republik Malagasi

Pemerintahan Tsirarana yang berkuasa sampai tahun 1972 mempunyai hubungan erat dengan Afrika Selatan, namun rezim baru di bawah Jondral Ramanantsoa maupun pemerintahan sekarang di bawah Didier Ratsiraka menolak kerjasama dan bahkan sejak tahun 1972 mengikuti jejak dan garis politik Tanzania dan Zambia.

### 3. Mozambique

Pada bulan Juni 1975, melalui operasi-operasi gerakan kemerdekaan tunggal Frelimo, Mozambique berhasil mencapai kemerdekaannya. Hal ini sangat menarik untuk diperhatikan, sebagai suatu test-case, karena ternyata bahwa Afrika Selatan tidak melakukan intervensi dan bahkan memperlihatkan sikap sabar dalam menghadapi perkembangan baru. Zamora Machol sebagai Presiden Mozambique yang pertama secara politis pada dasarnya dekat dengan Tanzania. Strategi yang diambil Mozambique menunjukkan kesadaran akan kenyataan adanya negara Afrika Selatan didasarkan kepada kenyataan kebutuhan akan kondisi damai untuk membangun Mozambique. Presiden Zamora Machol bersedia mengadakan perundingan dengan Afrika Selatan, walaupun, menyesuaikan dengan resolusi Konferensi Menteri-menteri Luar Negeri OAU di Darassalam bulan April 1975, yaitu bahwa bila jalan damai



tidak berhasil maka jalan perang yang akan ditempuh. Sampai sekarang belum dipersoalkan mengenai fungsi dan permasalahan Bendungan Cabora Bassa, yang akan merupakan sumber tenaga listrik untuk perindustrian Afrika Selatan, dan begitu pula belum dibahas permasalahan polabuhan Laurence Marques, yang sejak dahulu merupakan polabuhan yang dipergunakan untuk memenuhi keperluan Afrika Selatan.

#### 4. Namibia

Wilayah Namibia pernah menjadi jajahan Jerman. Setelah berakhirnya perang dunia I daerah Afrika Barat Daya dijadikan daerah perwalian Liga Bangsa-bangsa yang kemudian diteruskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedangkan mandat kekuasaan atas Namibia diserahkan kepada Afrika Selatan, hal mana telah menimbulkan kasus pertentangan di antara PBB dengan Afrika Selatan. Pengusahaan atas Namibia dilaksanakan oleh Afrika Selatan dengan cara memasukkannya sebagai salah satu propinsi Republik Afrika Selatan, sedangkan PBB berpendapat bahwa Namibia sebagai daerah mandat Afrika Selatan harus dipersiapkan untuk mendapatkan kemerdekaannya sendiri. Untuk penyelesaian masalah ini, PBB telah membentuk suatu dewan yang diketuai oleh Sean McBride.

Karena adanya tekanan dari PBB maka Afrika Selatan menyusun suatu konsepsi mengenai Namibia yang bertujuan menyusun suatu masyarakat multi-rasial, di mana dapat dijamin adanya penguasaan kulit putih terhadap mayoritas kulit hitam. Direncanakan akan dibentuk semacam "Bantustan-Bantustan" untuk tiap-tiap suku tersendiri. Sebaliknya, Sean McBride menyusun suatu konsep yang menjurus ke arah pemerintahan mayoritas. Konsepsi Sean McBride mendapatkan dukungan dari Swapo, suatu gerakan kemerdekaan Namibia, yang didukung oleh suku Ovambo yaitu suku yang terbesar dan meliputi sekitar separuh jumlah penduduk Namibia.

Pertentangan kedua konsepsi memuncak pada akhir tahun 1974. Pada waktu itu Sidang Umum PBB telah mengeluarkan Afrika Selatan dari persidangan, dan bahkan mayoritas Sidang Dewan Keamanan PBB berpendapat bahwa Afrika Selatan harus keluar dari keanggotaannya di PBB, namun usaha ini berhasil digagalkan melalui penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis.



Untuk sementara pemerintah Afrika Selatan berhasil memelihara ketertiban umum di Afrika Selatan dengan melalui tindakan penangkapan dan penahanan terhadap pimpinan Swapo, namun suasana ketidak-tenangan di bidang sosial politik di Namibia, ditambah dengan pendapat dunia yang mengutuk kebijakan pemerintah Afrika Selatan telah menyebabkan beberapa perusahaan asing raksasa terpaksa menghentikan aktivitasnya di Namibia, diantaranya adalah Corporation Oil, Phillips Petroleum dan Texaco.

Di Namibia terdapat pula tambang-tambang tembaga, uranium dan intan brilian yang masih tetap digarap dengan modal dari Afrika Selatan, di samping itu produksi hasil perikanan-kannya kian lama kian meningkat pula.

### 5. Rhodesia

Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 11 Nopember 1965 Rhodesia merupakan negara yang dapat dikatakan sebagai negara "rasialis" seperti Afrika Selatan, di mana sekelompok minoritas kulit putih memegang kekuasaan. Perbandingan penduduk kulit-putih dan kulit-hitam adalah 1 : 20. Sebagai reaksi atas tindakan rasialis yang dilakukan oleh Rhodesia, PBB telah menerima resolusi yang menuntut agar semua anggota PBB mengadakan embargo terhadap Rhodesia, namun Rhodesia hingga sekarang masih berhasil untuk bertahan.

Di samping itu di dalam negeri Rhodesia sendiri timbul gerakan-gerakan kulit hitam yang tergabung dalam organisasi ZANU dan ZAPU. Perkumpulan ZANU dan ZAPU dilarang oleh pemerintah Rhodesia. Polisi Rhodesia bekerjasama dengan polisi Afrika Selatan melakukan "penertiban", penangkapan dan menangkap pimpinan-pimpinan organisasi tersebut. Untuk mempelajari permasalahan yang ada di Rhodesia, pemerintah Inggris pada tahun 1971 mengirimkan sebuah misi di bawah Lord Pearce. Pemerintah Rhodesia mengadakan penjagaan ketat agar tidak terjadi keributan yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi laporan yang akan dibuat oleh Lord Pearce. Namun penduduk kulit hitam berhasil menerobos penjagaan ketat pemerintah Rhodesia dan melancarkan demonstrasi yang berakibat dihasilkannya laporan yang bernada negatif mengenai pemerintah Rhodesia.

Dengan kemenangan yang dicapai Frelimo di Mozambique, pemerintah Rhodesia, di bawah tekanan Afrika Selatan, berusaha mencari penyelesaian dengan golongan nasionalis. Pemimpin-pemimpin



ZANU dan ZAPU dibebaskan untuk memungkinkan penyelenggaraan konperensi di Lusaka, dan golongan ketiga, yaitu African National Congress (ANC) yang terbontok setelah kunjungan Lord Poarce juga diikuti-sortakan. Penyelesaian yang ingin dicapai terbentur oleh beberapa sebab antara lain: (1) Pemerintah Rhodesia menghendaki adanya waktu tenggang selama 5-10 tahun sebelumnya menyorahkan kekuasaannya ke dalam sistim multi-rasial, sedangkan pihak pejuang maupun mayoritas di forum PBB menghendaki adanya kemerdekaan segera atas azas mayoritas; (2) Pihak-pihak yang menjagoi kelompok-kelompok yang bersengketa di Rhodesia, yaitu Vorster dari Afrika Selatan yang berada pada pihak pemerintah Rhodesia dan Kaunda dari Zambia yang berada di pihak gerakan kemerdekaan, walaupun bersedia untuk bertemu namun tidak mau merubah prinsip yang dianut masing-masing pihak; (3) Di samping itu pihak Zambia ternyata terdapat 'pilih kasih' dalam membantu golongan-golongan gerakan hitam di Rhodesia. Pengikut-pengikut gerakan ZANU, yang umumnya lebih militan, telah ditangkap oleh Zambia, begitu pula terhadap pemimpin ANC Bishop Matzulewa.

Penghasilan Rhodesia terutama berasal dari tembakau dan chrome yang dijual melalui Afrika Selatan.

## 6. Angola

Afrika Selatan menanankan modalnya di Angola melalui penilikan sahan-sahan pada beberapa perusahaan, antara lain perusahaan kereta api Benguela, perusahaan minyak, bidang perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dengan terjadinya perang saudara di antara ketiga golongan gerakan kemerdekaan sekarang, yaitu FNLA di bawah pimpinan Holden Roberto terdiri dari suku-suku di bagian utara Angola, UNITA di bawah Savimbi berpangkalan di bagian selatan, serta MPLA di bawah Dr. Neto di daerah pusat Angola, maka investasi Afrika Selatan dan Portugal di Angola menjadi terancam.

Perkembangan di Angola telah melibatkan beberapa negara besar didalamnya. Uni Soviet dan Kuba memberikan dukungan kepada MPLA yang berideologi Marxist dengan kader-kader yang mahir dalam perjuangan gerilya. Menurut berita-berita, bantuan Uni Soviet dan Kuba tidak hanya dalam bentuk bantuan persenjataan saja tapi bahkan juga sampai kepada bantuan personel militer. Tanzania, Zambia dan Botswana yang merupakan negara tetangga dari Angola mempunyai kecenderungan pula untuk membantu MPLA. Sedangkan FNLA memperoleh bantuan penuh persenjataan



dari Zaire yang dikabarkan mendapatkan perlengkapannya dari RRC, antara lain termasuk bantuan instruktur, dan juga dari Amerika Serikat. Bagaimana sikap Afrika Selatan menghadapi masalah di Angola masih belum jelas, tapi dapat diduga bahwa Afrika Selatan ikut pula terlibat, terutama karena daerah Namibia berbatasan dengan Angola.

Beberapa kali telah diusahakan untuk mempertemukan ketiga gerakan kemerdekaan yang ada untuk bersatu menerima kemerdekaan tanggal 11 Nopember 1975, namun usaha-usaha yang ada tetap gagal. Akibat pergolakan yang terdapat di Angola maka ratusan ribu orang kulit putih telah meninggalkan Angola karena takut akan anarki yang diperkirakan pasti akan timbul setelah 11 Nopember itu.

#### Detente dan Detensi

Bangsa kulit putih di Afrika Selatan yang merupakan minoritas kecil berkuasa penuh atas mayoritas kulit hitam melalui kekuatan dan ketrampilan mereka di bidang ekonomi dan teknologi telah berhasil mengembangkan Afrika Selatan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di benua Afrika dan menempatkan mereka sebagai partner negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang.

Bangsa kulit putih di Afrika Selatan menanamkan dirinya "Afrikaners", artinya orang-orang Afrika. Untuk mempertahankan hidup mereka di tanah yang mereka diami sekarang, mereka memegang faham rasialisme dengan sistim apartheidnya, yang telah mendarah daging pada diri mereka sejak abad ke-XVIII pada waktu pendatang Belanda memutuskan bahwa perkembangan di Afrika Selatan akan dilakukan dengan sistim perbudakan.

Walaupun rasialisme terkutuk di seluruh dunia, yang tercermin dari adanya resolusi PBB tahun 1963 yang "menganjurkan" anggota-anggota PBB untuk memboikot Afrika Selatan, lebih-lebih lagi dengan adanya resolusi Sidang Umum PBB tahun 1974 ditambah pula dengan pendapat mayoritas sidang Dewan Keamanan PBB yang menyetujui dikeluarkannya Afrika Selatan dari keanggotaan di PBB, resolusi tersebut gagal hanya karena veto Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, namun sulit untuk dibayangkan bahwa Afrika Selatan akan merubah faham rasialisme dan sistim apartheid yang telah ditempuhnya. Politik rasialis



yang dijalankan Afrika Selatan tersebut telah menimbulkan suasana konfrontasi antara bangsa-bangsa Afrika Hitam di satu pihak dengan Afrika Selatan di lain pihak.

Menghadapi perkembangan di Afrika umumnya terutama dengan bertambah gencarnya arus gerakan pembebasan, maka Afrika Selatan ternyata bersedia mengadakan "detente" sekalipun tidak meninggalkan garis rasialis dan apartheidnya. Hal ini terlihat dari sikap Afrika Selatan pada waktu Mozambique mencapai kemerdekaan melalui perjuangan Frelimo, yang menerima hal itu sebagai satu kenyataan dengan harapan akan dapat dicapai suatu akomodasi di antara Mozambique hitam dengan Afrika Selatan yang putih di kemudian hari. Afrika Selatan melakukan penekanan terhadap pemerintah putih di Rhodesia di bawah Ian Smith untuk melakukan akomodasi dengan mayoritas kulit hitam. Beberapa konperensi di antara pemerintah Ian Smith dengan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan telah diselenggarakan, baik di perbatasan Rhodesia-Zambia maupun di Zambia sendiri. Namun hingga sekarang belum terlihat adanya hasil yang meyakinkan, karena pihak Afrika Hitam melihat penyelesaian yang ada melalui suatu usaha pembentukan negara dengan sistim pemerintahan yang mengganbarkan mayoritas kulit hitam, sedangkan sebaliknya kelompok kulit putih yang memerintah mengkhayalkan untuk membentuk suatu negara multi-rasial yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan kepentingan minoritas kulit putih.

Kemerdekaan yang dicapai Angola pada tanggal 11 Nopember 1975 merupakan suatu test-case bagi "politik detente" Afrika Selatan. Sementara kemerdekaan diumumkan, tiga kekuatan di Angola saling berjuang untuk menunjukkan kekuatannya, yaitu MPLA di bawah pimpinan Dr. Agostinho Neto dibantu oleh Uni Soviet, Kuba, Tanzania dan Zambia, FNLA mendapatkan bantuan dari RRC dan Amerika Serikat melalui Mobutu dari Zaire, dan kelompok UNITA yang bergorak di bagian sebelah selatan. Dapat diperkirakan bahwa perkembangan di Angola setelah kemerdekaan akan menyerupai perang saudara di Zaire (Kongo) dahulu.

Dalam hubungan dengan negara-negara hitam di luar perbatasan Afrika Selatan, maka pemerintahan minoritas kulit putih di bawah P.H. John Vorster memang melakukan "detente", namun ke dalam, seperti yang terjadi di Namibia dan Cwamboland yang terjadi adalah "detensi", yaitu penangkapan dan penahanan terhadap pemimpin-pemimpin gerakan kemerdekaan hitam.



Selubungan dengan usaha Afrika Selatan untuk membentuk 'Bantustan-Bantustan', diantaranya di daerah Ovamboland, sebuah daerah yang berbatasan langsung dengan Angola, alat-alat kekuasaan Afrika Selatan melakukan penindasan dan pengejaran terhadap perjuangan suku Ovambo yang bergerak di bawah pimpinan Swapo. Lebih dari separuh penduduk Namibia terdiri dari suku Ovambo, daerah yang berbatasan dengan Angola, dan sebagian lagi tinggal di daerah Angola. Dengan alasan untuk menangkap pimpinan Swapo, tidak tertutup kemungkinannya alat-alat kekuasaan Afrika Selatan melintasi perbatasan dengan Angola untuk tujuan intervensi.

Walaupun pemerintah Afrika Selatan telah 'meredakan' atau 'melunakkan' undang-undang dan ordonansi-ordonansi apartheid, namun baik pihak pemerintah maupun oposisi di Afrika Selatan sama-sama berkepentingan untuk mempertahankan sistim apartheid yang berlaku. Sebaliknya, negara-negara Afrika Hitam semua menentang dan mengutuk apartheid.

Sistim Apartheid di Afrika Selatan merupakan unsur pemersatu bagi negara-negara Afrika Hitam, baik dalam lingkungan OAU (Organisasi Persatuan Afrika), Forum Non-Alignment maupun PBB, namun untuk menghapuskan Apartheid itu sendiri, tidak cukup lagi dengan hanya sekedar resolusi-resolusi dari forum-forum internasional. Satu-satunya jalan yang dilihat adalah melalui perjuangan-perjuangan kemerdekaan di dalam negeri Afrika Selatan sendiri, artinya dengan menggerakkan African National Congress (ANC) dan Pan African Congress. Kedua gerakan tersebut telah dilarang oleh pemerintah Afrika Selatan, bahkan pemimpin-pemimpinnya seperti Nelson Mandela dan ratusan kawannya telah dibuang ke salah satu pulau, namun buruh dan mahasiswa masih terus bergerak.

Keberhasilan perjuangan gerakan-gerakan kemerdekaan di Mozambique (Frelimo), PAIGC di Guinea Bissau dan Cap Verde, serta perkembangan di Angola memberikan pelajaran kepada gerakan kulit hitam di Afrika Selatan, bahwa revolusi tidak mungkin di 'import'.

#### Penutup

Pergolakan di Afrika Selatan diperkirakan akan berjalan terus, karena pemerintahan kulit putih di Afrika Selatan tetap bertekad untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya



sebagai "Afrikaners" melalui kekuatan militer maupun ekonomi; dengan bantuan langsung atau tidak langsung dari negara-negara industri lainnya. Di lain pihak bangsa-bangsa Afrika Hitam sekalipun dengan segala kelemahan yang dimilikinya baik daya kemiliteran maupun ekonominya tetap bertekad untuk menentang rasialisme dan sistim apartheid yang merendahkan martabat manusia merdeka yang dianut oleh Afrika Selatan.

Pergolakan di daerah Afrika Selatan tersebut berarti suatu pergolakan di wilayah barat Samudra Indonesia dan dapat meluas ke wilayah-wilayah lain yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan di kawasan tersebut dan secara langsung atau tak langsung mempengaruhi Indonesia pula. Berdasarkan perjuangan kemerdekaan dengan dasar Pancasila yang dianutnya, maka adalah wajar bahwa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas di Afrika.

#### Sumber-sumber

- IISS, Strategic Survey 1974, Conflicts, Southern Africa.
- International Spectator, Juni 1975, Ontspanning in Zuid Afrika?, hal. 353.
- CSIS, Analisa, Desember 1974, Afrika Bergolak Terus.
- Afrika Yearbook 1972, South Africa, Statistical Survey, hal. 710.





## PEREBUTAN KEKUASAAN DI ANGOLA

Kirdi DIPOYUDO

### Pengantar

Pada tanggal 10 Nopember 1975 Portugal mengakhiri kekuasaan di negeri jajahannya yang terakhir di Afrika sesuai dengan persetujuan yang dicapai di Alver pada tanggal 15 Januari 1975 antara Portugal dan ketiga gerakan pembebasan Angola. Akan tetapi menyimpang dari rencana semula, kedaulatan tidak diserahkan kepada ketiga gerakan itu bersama-sama melainkan kepada seluruh rakyat Angola karena gerakan-gerakan itu sejak bulan April terlibat dalam suatu perang saudara yang sengit. Pada hari berikutnya diproklamkan dua negara, Republik Rakyat Angola di Luanda oleh MPLA dan Republik Demokrasi Rakyat Angola di Huambo oleh FNLA dan UNITA, yang masing-masing mengklaim seluruh negeri sebagai wilayah kekuasaannya. Dengan demikian kemerdekaan bagi Angola tidak berarti perdamaian dan awal pembangunan untuk hari depan yang lebih baik, melainkan eskalasi perang saudara, yang tidak hanya akan lebih banyak minta korban dan menimbulkan lebih banyak kerusakan serta kerugian, tetapi juga melibatkan negara-negara lain, negara-negara komunis di pihak MPLA dan negara-negara barat di pihak lawannya. Sebagai akibatnya perang saudara juga menjadi suatu pertarungan antara timur dan barat untuk mendapatkan pengaruh atas negeri yang tidak hanya kaya sumber alam tetapi juga mempunyai arti strategi yang besar berkat letaknya di pantai Samudra Atlantik Selatan dekat jalur pelayaran Tanjung Harapan, salah satu urat nadi negara-negara barat.

Perobutan kekuasaan di Angola itulah tema tulisan ini. Secara berturut-turut akan dibahas eskalasi perang saudara, pokok sengketa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, campur tangan asing dan pertarungan negara-negara besar, usaha-usaha perdamaian yang dilakukan sejauh ini, kemungkinan-kemungkinan dan prospek penyelesaiannya. Sebagai titik tolak untuk lebih memahami perang saudara itu akan dibicarakan lebih dahulu komposisi etnis penduduk Angola dan ringkasan sejarahnya. Dan sebagai penutup akan dibahas sejauh mana pergolakan di Angola itu relevan untuk kita.



### Latar belakang

Rakyat Angola sebagian besar adalah orang Negro Bantu, tetapi belum merupakan suatu bangsa yang kompak. Mereka terpecah dalam enam kelompok etnis besar, yang masing-masing meliputi banyak suku. Menurut perkiraan penduduk seluruh negeri kini berjumlah sekitar 6 juta orang dan terdiri atas 100 suku, yang tidak hanya terpisah satu sama lain, tetapi kerap kali juga saling bersaing dan bermusuhan. Pada umumnya faktor kesukuan masih memegang peranan yang penting dalam kehidupan mereka dan dalam ketiga gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Angola dari kekuasaan kolonial. Bahkan di kalangan pemimpin-pemimpin kesadaran nasional belum tersebar luas.

Yang paling besar ialah kelompok bangsa Ovimbundu yang mendiami daerah tengah selatan dan merupakan sepertiga penduduk, disusul kelompok bangsa Mbundu yang bertempat tinggal di daerah sebelah utaranya dan merupakan seperempat penduduk. Yang ketiga ialah kelompok bangsa Bakongo, sekitar sepersepuluh penduduk, yang mendiami Angola Utara, sebagian wilayah Zaire dan daerah enklave Cabinda. Kelompok bangsa Chokwe Lunda, sekitar 7,5% penduduk, menempati Angola Timur, kelompok bangsa Ngangola, sekitar 7% penduduk, bertempat tinggal di Angola Tenggara, dan kelompok bangsa Nyaneka Nambo, sekitar 4% penduduk, di Angola Selatan dan Tenggara. Selain itu terdapat kelompok kulit putih, yang pada awal tahun 1975 ini berjumlah setengah juta orang tetapi kebanyakan meninggalkan Angola selama perang saudara ini (lihat Tabel).

Pada tahun 1483 ketika orang-orang Portugis tiba di Angola mereka menemukan suatu kerajaan Bakongo di Angola utara yang mengesankan. Rakyatnya sudah dapat mengolah besi serta tembaga dan menggunakan siput-siput sebagai mata uang. Pada tahun 1575 orang-orang Portugis mulai memperluas kekuasaan mereka ke jurusan selatan, tetapi tidak banyak melakukan kolonisasi karena sibuk dengan perdagangan budak yang lebih menguntungkan, terutama pada tahun 1648-1836 ketika budak-budak Angola diangkut ke Brasilia. Baru setelah perbudakan dihapus, mereka mulai menjelajahi daerah pedalaman dan menetapkan perbatasannya. Pada tahun 1918 mereka membentuk suatu pemerintahan kolonial setelah berhasil mengukuhkan kekuasaan Portugis di seluruh negeri. Pada tahun 1930 kekuasaan itu



TABEL

=====

KOMPOSISI ETNIS PENDUDUK ANGOLA (1960)

=====

Bangsa	Daerah	Jumlah	%
Ovimbundu	Tengah Selatan	1.450.000	39
Mbundu	Tengah	1.100.000	23
Bakongo	Utara	500.000	10
Chokwe Lunda	Timur	360.000	7,5
Ngangela	Tenggara	330.000	7
Nyaneka Humbe	Selatan, Tenggara	200.000	4
Kulit putih		225.921	5
Lain-lain		669.528	13,5
Jumlah		4.830.449	100

=====

Sumber : Michael A. Samuels dan Norman A. Bailey, "African Peoples", dalam buku David M. Abshire dan Michael A. Samuels, ed., Portuguese Africa (New York - Washington - London, 1969), hal. 113-114. Lihat juga "Angola's Battle for Birth", Newsweek, 17 Nopember 1975.

Catatan : Masing-masing bangsa terdiri atas sejumlah suku. Menurut perkiraan terdapat sekitar 100 suku di seluruh negeri. Bangsa Bakongo juga terdapat di Zaire, sekitar sejuta orang. Angka-angka adalah hasil sensus 1960. Kini penduduk Angola diperkirakan berjumlah 6.000.000 orang Negro dan 50.000 orang kulit putih.

diperketat, tetapi pada tahun 1951 status Angola dirubah menjadi propinsi seberang lautan Portugis, dan pada tahun 1961 kepada semua penduduk pribumi diberikan hak untuk menjadi warga negara Portugis.<sup>1</sup>

Namun pemimpin-pemimpin rakyat tidak puas dengan keadaan itu dan menuntut kemerdekaan. Oleh sebab Pemerintah Portugis menolak tuntutan itu, mereka memutuskan untuk menggunakan kekerasan dan pada tahun 1961 melancarkan suatu pemberontakan. Pemerintah kolonial Portugis segera mendatangkan bala bantuan dari Portugal dan berhasil menumpas pemberontakan itu. Mula-mula kegiatan gerakan kemerdekaan berkurang, tetapi pada tahun 1965 dimulai lagi suatu gelombang baru aksi di daerah perbatasan dengan Zaire dan Zambia. Lambat laun pejoang-pejoang kemerdekaan itu berhasil menguasai daerah luas di Angola timur dan melakukan tekanan berat ke jurusan barat. Akan tetapi aksi mereka kurang efektif karena mereka pecah

1 Lihat karangan "Angola", dalam Encyclopaedia Americana, I (New York, 1971), hal. 851; Basil Davidson, "Recent history of Portugal's African Territories", dalam Africa South of the Sahara 1972 (London, 1972), hal. 144-149.



dalam tiga kelompok yang saling bersaing dan lebih banyak bertarung satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan dan bantuan asing daripada bertempur melawan pasukan-pasukan Portugis. Masing-masing menganggap dirinya sebagai wakil rakyat Angola dan memusuhi kelompok-kelompok lainnya. Sebagai akibatnya Pemerintah kolonial berhasil membatasi kegiatan mereka.<sup>1</sup>

Pertempuran di Angola berhenti tidak lama sesudah kudeta di Lisabon pada 25 April 1974. Pemerintah Portugis menghentikan aksi-aksinya melawan para gerilyawan, antara lain karena takut pasukan-pasukannya akan membangkang, dan segera menghubungi gerakan-gerakan kemerdekaan. Sebagai hasilnya pada 17 Juni 1974 tercapai persetujuan gencatan senjata dengan UNITA, dan pada 20 Juli dengan MPLA. FNLA mula-mula meningkatkan aksi-aksinya untuk memperkuat kedudukannya tawar menawar di meja perundingan, tetapi pada 17 Oktober juga setuju untuk menghentikan tembak menembak. Namun permusuhan antara ketiga gerakan itu berlangsung terus dan sebagai akibatnya Angola tidak segera mendapatkan kemerdekaan karena Pemerintah Portugis tidak tahu kepada siapa kedaulatan akan diserahkan.<sup>2</sup>

Akan tetapi mereka akhirnya mencapai sepakat kata untuk membagi kekuasaan dan bersama-sama mengadakan perundingan-perundingan dengan Portugal, antara lain atas tekanan banyak negara Afrika dan Pemerintah Portugis. Perundingan-perundingan dilaksanakan di Portugal pada 10-15 Januari 1975 dan menghasilkan suatu persetujuan kemerdekaan. Angola akan mendapatkan kemerdekaannya pada 11 Nopember 1975 dan sebagai persiapan akan dibentuk suatu pemerintah koalisi peralihan, masing-masing gerakan akan menyumbangkan 8.000 orang pasukan bagi pembentukan tentara nasional, dan akan diadakan pemilihan umum untuk Majelis Nasional, yang bertugas menyusun konstitusi, mendirikan negara dan memilih Presiden Angola yang pertama, yang pada gilirannya akan menerima kedaulatan dari Portugal.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Lihat George Martelli, "Conflict in Portuguese Africa", dalam David M. Abshire dan Michael A. Samuels, Portuguese Africa. A Handbook (New York - Washington - London, 1969), hal. 406-415.

<sup>2</sup> Lihat Peter Janke, Southern Africa: End of Empire (London: ICS, 1974), hal. 6-7.

<sup>3</sup> Lihat Indonesian Observer, 17 Januari 1975; juga Sinar Harapan, 16 Januari 1975.



## Eskalasi perang saudara

Namun harapan semula, bahwa sesudah itu proses dekolonisasi akan berjalan dengan lancar, tidak menjadi kenyataan. Tidak semua langkah yang disetujui sebagai persiapan kemerdekaan itu jadi diambil karena beberapa bulan kemudian berkobar lagi pertempuran-pertempuran antara MPLA dan FNLA, yang makin lama makin sengit dan akhirnya juga melibatkan UNITA di pihak FNLA. Pada pertengahan bulan Agustus Pemerintah sementara yang abontuk pada akhir Januari berhenti berfungsi setelah MPLA berhasil mengusir FNLA dan UNITA dari ibukota Luanda. Portugal mengambil alih kekuasaan dan membontuk suatu rojim militer tetapi tidak berhasil mengakhiri perang saudara itu. Pertempuran-pertempuran berlangsung terus dan Angola pecah menjadi tiga, bagian utara di bawah FNLA, bagian tengah dan Cabinda di bawah MPLA dan bagian selatan di bawah UNITA.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan itu diajukan saran kepada Pemerintah Portugis untuk menunda penyerahan kedaulatan sampai tercapai perdamaian antara ketiga gerakan tersebut, akan tetapi Portugal menolaknya dan mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada Angola pada 11 Nopember sesuai dengan rencana semula. Pada 10 Nopember Komisaris Tinggi Portugis Laksamana Leonel Alexander Cardoso, atas nama Pemerintah Portugis, menyerahkan kedaulatan kepada seluruh rakyat Angola, tidak kepada salah satu pihak sengketa.<sup>2</sup> Secara demikian Portugal memberikan kemerdekaan kepada Angola tetapi tidak memihak dan tidak mau mencampuri urusan intern rakyatnya. Cara itu sebenarnya kurang bertanggung jawab, tetapi bagi Portugal tiada pilihan lain yang lebih baik.

Pada 11 Nopember 1975 MPLA memproklamkan Republik Rakyat Angola dengan Dr. Agostinho Neto sebagai Presiden pertama. Sebaliknya FNLA dan UNITA bersama-sama memproklamkan Republik Demokrasi Rakyat Angola dengan Nova Lisboa, yang namanya dirubah menjadi Huambo, sebagai ibukota sementara, dan kekuasaan politik pada Dewan Nasional Revolusi, yang terdiri atas 24 orang, yaitu 12 orang dari FNLA dan 12 orang dari UNITA. Secara demikian Angola mendapatkan kemerdekaannya, tetapi menjadi rebutan dua pemerintah yang mengklaimnya dan

<sup>1</sup> Lihat karangan "Civil War", dalam Newsweek, 14 April 1975 dan "Angola. The dogs of war", Newsweek, 25 Agustus 1975.

<sup>2</sup> Lihat Kompas, 11 Nopember 1975.



mencari dukungan di luar negeri. Republik Rakyat Angola segera diakui Uni Soviet, sejumlah negara komunis lainnya dan beberapa negara sosialis di Afrika. Negara-negara barat dan beberapa negara Afrika mendukung dan membantu FNLA dan UNITA tetapi sejauh ini belum mengakui Republik Demokrasi Rakyat Angola.<sup>1</sup>

Dengan demikian kemerdekaan tidak berarti perdamaian dan awal pembangunan bagi Angola. Perang saudara bahkan menjadi lebih sengit. Setelah pejabat-pejabat dan pasukan-pasukan Portugis pergi, kedua pihak dapat saling menyerang secara leluasa. MPLA telah menyusun suatu strategi untuk mengalahkan kedua gerakan lawannya dan percaya akan dapat melakukannya dalam 8 bulan. Dalam hubungan ini tokoh-tokoh MPLA menyamakan mereka dengan kaum secesienis Biafra yang akhirnya dapat dikalahkan oleh pasukan-pasukan Pemerintah Federal. Akan tetapi perhitungan mereka itu dapat meleset sama sekali, karena FNLA dan UNITA juga telah bertekad untuk meningkatkan kampanye mereka dan mencapai sepakat kata untuk mengkoordinir langkah-langkah mereka. Sebelum 11 Nopember, setelah pasukan-pasukan Portugis meninggalkan Angola, FNLA akan menyerang Luanda dari jurusan utara, sedangkan UNITA dengan bantuan FNLA akan menyerang kedudukan-kedudukan MPLA di Angola Selatan, tidak hanya untuk merebutnya tetapi juga untuk memecah kekuatan MPLA. Dengan taktik ini FNLA dan UNITA percaya akan dapat mengalahkan MPLA.<sup>2</sup>

FNLA dan UNITA telah mulai melaksanakan rencana itu, tetapi tidak semuanya berjalan sesuai dengan perhitungan mereka. Dengan bantuan tentara sewaan Portugis dan bantuan senjata serta logistik Afrika Selatan, pasukan gabungan mereka berhasil memukul mundur pasukan-pasukan MPLA di Angola selatan dan dengan cepat merebut kembali kota-kota Sa da Bandeira, Mocamedes, Benguela, Lobito dan Novo Redondo, dan mencapai jarak 20 km dari Luanda. Pada waktu yang sama pasukan gabungan mereka lainnya berhasil merebut kota-kota Angola timur yang dikuasai MPLA, termasuk Texeira do Sousa, Henrique de Carvalho dan Malanje, dan bergerak menuju Luanda dari jurusan timur. Mereka bermaksud menggempungnya dari tiga jurusan agar

---

<sup>1</sup> Lihat Kompas, 12 Nopember 1975.

<sup>2</sup> Lihat karangan James Mac Manus, "MPLA prepares for a long war", dalam The Guardian, 4 Oktober 1975; dan "Rival Angolan forces prepare for independence", dalam Indonesian Observer, 31 Oktober 1975.



menderita kekurangan pangan dan jatuh seperti kota Saigon. Akan tetapi ofensif FNLA dari jurusan utara mengalami kegagalan. Dengan bantuan pasukan-pasukan Kuba dan senjata berat Soviet, termasuk meriam dan kendaraan berlapis baja, MPLA berhasil menangkis serangan itu dan menyebabkan banyak kerugian. Tetapi sebagai keseluruhan MPLA mengalami kekalahan dan terus terdesak.<sup>1</sup>

Melihat perkembangan itu Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya menjadi cemas dan melancarkan suatu operasi secara besar-besaran untuk menyelamatkan MPLA. Dengan cepat pesawat-pesawat pengangkut Soviet maupun kapal-kapal mengangkut senjata dan amunisi dalam jumlah yang besar ke Angola, termasuk tank, kendaraan berlapis baja, meriam, mortir, roket dan peluncurnya, pesawat tempur MIG-21 dan lain sebagainya. Menurut suatu laporan MPLA telah menerima 200 tank T-54, kendaraan berlapis baja PT-76, mortir 122 mm, selusin pesawat MIG-21 dan bahkan sejumlah peluru kendali. Sebagian tank itu dikirimkan ke Cabinda untuk memperkuat pasukan-pasukan MPLA yang menghadapi serangan-serangan Front Pembebasan Enklave Cabinda (FLEC) yang dibantu oleh Zaire. Uni Soviet juga mengirimkan beratus-ratus teknisi untuk melatih pasukan-pasukan MPLA menggunakan senjata-senjata itu dan mendampingi mereka sebagai penasihat di medan pertempuran. Selain itu MPLA dibantu beribu-ribu orang militer Kuba, termasuk penerbang, awak tank, awak meriam, instruktur, penasihat dan infanteri, dan beberapa ratus orang tentara Mozambique. Kehadiran orang-orang Kuba itu sudah terasa di medan pertempuran. Antara lain berkat bantuan mereka, MPLA berhasil menangkis serangan FNLA terhadap Luanda. Akhir-akhir ini bahkan diberitakan bahwa FNLA terpaksa mengosongi kota Ambriz, 160 km sebelah utara Luanda, karena menjadi sasaran peluru-peluru kendali. Sementara itu bantuan militer terus mengalir.<sup>2</sup>

Sebaliknya negara-negara barat yang mendukung FNLA dan UNITA juga meningkatkan dan mempercepat bantuan militer mereka untuk mengimbangi bantuan blok komunis itu.<sup>3</sup> Hal ini terjadilah suatu

<sup>1</sup> Lihat karangan "The Battle for Angola", dalam Foreign Report, 12 November 1975.

<sup>2</sup> Lihat "The Russians have come", Newsweek, 1 Desember 1975; "Nete's Friend", dalam The Economist, 22 November 1975.

<sup>3</sup> Mengenai bantuan negara-negara barat lihat Alan Rake, "Shades of Biafra in the Angola War", Gemini yang dimuat The Indonesia Times, 29 November 1975; berita UPI yang dimuat dalam Indonesian Observer, 15 Desember 1975.



perlombaan senjata, dan sebagai akibatnya perang saudara di Angola menjadi lebih sengit dan sengketaanya lebih sukar diselesaikan. Negara-negara pendukung berlomba agar pihak yang mereka dukung ke luar sebagai pemenang atau paling tidak terhindar dari kekalahan yang menentukan. Dari semuanya ini mungkin dapat disimpulkan, bahwa sengketa antar golongan di Angola itu tidak akan dapat diselesaikan dengan kekerasan.

### Sengketa antar golongan

Perang saudara di Angola pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk menyelesaikan suatu sengketa antar golongan dengan kekuatan senjata. Dalam sengketa ini berhadapan sebagai lawan MPLA dan Rakyat Angola yang dibentuknya di satu pihak dan gabungan FNLA-UNITA serta Republik Demokrasi Rakyat Angola di lain pihak. UNITA mula-mula berusaha menjauhkan diri dari sengketa antara MPLA dan FNLA karena ketuanya Dr. Jonas Savimbi percaya bahwa perang saudara membahayakan persatuan Angola dan bahwa oleh sebab itu sengketa mereka harus diselesaikan secara politik dan sehubungan dengan itu diadakan pemilihan umum. Akan tetapi akhirnya terlibat juga dalam perang saudara dan bergabung dengan FNLA melawan MPLA, karena gerakan yang terakhir ini juga bermaksud menghancurkannya.

Sengketa antar golongan itu pada intinya adalah suatu perebutan kekuasaan. Dalam anggapan bahwa kedua gerakan lawannya dapat dikalahkan dengan kekerasan senjata, MPLA menolak membagi kekuasaan dan menghuntutnya bagi dirinya sendiri. FNLA dan UNITA juga menginginkan kekuasaan dan berusaha untuk mendapatkannya, tetapi bersedia untuk membaginya dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Atas tekanan sementara negara Afrika dan Pemerintah Portugis, MPLA beberapa kali menyatakan bersedia untuk berdamai dengan kedua gerakan lawannya dan membagi kekuasaan, tetapi setiap kali menarik kembali persetujuan itu.

Berbagai faktor ikut bicara dalam sengketa dan perang saudara itu. Pertama-tama faktor kesukuan. Gerakan-gerakan kemerdekaan itu tidak mempunyai dasar etnis yang luas tetapi terikat dengan kelompok bangsa tertentu. Sebagian besar dukungan MPLA datang dari kelompok bangsa Mbundu, sedangkan FNLA mendapatkan dukungannya dari kelompok bangsa Bakongo,



yang bertempat tinggal di Angola utara, Cabinda dan beberapa daerah Zaire, dan UNITA dari kelompok bangsa Ovimbundu. Setelah Daniel Chipenda dan kelompoknya memisahkan diri dari MPLA dan bergabung dengan FNLA, gerakan yang terakhir ini juga mendapat dukungan luas di kalangan kelompok bangsa Chokwe Lunda (lihat Tabel).

Banyaknya kelompok etnis dalam satu bangsa tidak selalu menimbulkan perpecahan dan perang saudara, tetapi di Angola tiada pemimpin yang berhasil menunjukkan dirinya sebagai pemimpin nasional atau mendapatkan pengikut di seluruh negeri. Hanya Savimbi mendekati cita-cita itu dalam tahun terakhir karena berhasil menyelamatkan gerakannya dari bentrokan-bentrokan FNLA-MPLA, tetapi seperti kita lihat di atas akhirnya dia terpaksa mengambil bagian dalam perang saudara. Dengan demikian sengketa antar gerakan kemerdekaan juga menjadi suatu sengketa antar suku.<sup>1</sup>

Faktor lain yang lebih penting ialah perbedaan-perbedaan ideologi. MPLA menganut sistim Marxis pola Soviet, sedangkan FNLA dan UNITA menganut sistim demokrasi dan memberikan tempat kepada usaha swasta. Sebagai suatu gerakan yang berhaluan Marxis, MPLA memperjuangkan monopoli kekuasaan dan pembentukan suatu negara dengan sistim pemerintahan partai tunggal, dan oleh sebab itu sukar berdampingan secara damai dengan golongan-golongan lain. Sehubungan dengan itu kiranya benarlah tuduhan bahwa MPLA sengaja menggagalkan persetujuan kemerdekaan tersebut dan oleh sebab itu dapat dipandang sebagai faktor utama perang saudara di Angola. Sebaliknya FNLA dan UNITA lebih bersifat demokratis dan lebih mudah menerima kekuatan-kekuatan lain dalam pemerintahan. Dalam wilayah yang dikuasainya MPLA telah mendirikan komite-komite rakyat, milisia rakyat, komite-komite buruh dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi gerakan menganut sistim sosialis yang keras dan bermaksud mengadakan nasionalisasi secara besar-besaran. UNITA juga menganut sistim sosialis tetapi sikapnya moderat. Dengan demikian perang saudara di Angola adalah juga suatu pertarungan ideologi, antara ideologi Marxis dan demokrasi sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat karangan Patrick Gilkes, "Why the Africans are fighting each other in Angola", Indonesian Observer, 8 Agustus 1975.

<sup>2</sup> Lihat "Angola's battle for birth", Newsweek, 17 Nopember 1975; Patrick Gilkes, loc. cit.



Akhirnya juga harus disebutkan ambisi pribadi para pemimpin ketiga gerakan itu. Mereka bersaing untuk menduduki jabatan tertinggi dalam Angola merdeka, yang tidak hanya berarti kedudukan kehormatan dan kekuasaan tetapi juga kesempatan yang luas. Mereka tidak ingin menjadi orang kedua di bawah lawan mereka. Persaingan ini tidak hanya terdapat antara Agostinho Neto dan Holden Roberto tetapi juga antara Holden Roberto dan Jonas Savimbi. Hal ini antara lain terungkap dalam susunan pemerintahan Republik Demokrasi Rakyat Angola. Pengisian jabatan presiden ditangguhkan sampai pemilihan umum dan dalam kabinet duduk dua orang perdana menteri yang memimpinnya secara bergiliran. Ambisi pribadi itu juga terdapat di kalangan pemimpin-pemimpin yang lebih rendah.<sup>1</sup>

#### Campur tangan asing

Sejak permulaan sengketa antar golongan di Angola memancing campur tangan asing, tidak hanya karena kekayaan alam negeri dan letak strategisnya dekat salah satu urat nadi negara-negara barat tetapi juga karena pertarungan ideologi tersebut. Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya kecuali Cina menginginkan kemenangan MPLA dan memberinya bantuan militer secara besar-besaran. Sebaliknya negara-negara demokrasi barat, terutama Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman Barat dan Afrika Selatan berkepentingan dengan kemenangan FNLA dan UNITA dan memberikan bantuan militer kepadanya. Mereka paling tidak berusaha mencegah Angola menjadi suatu negeri komunis yang akan memberikan tempat berpijak kepada Uni Soviet untuk memperluas pengaruhnya di Afrika. Di benua Afrika sendiri sementara negara yang berhaluan kiri seperti Kongo, Mozambique, dan Aljazair membantu MPLA, sedangkan sementara negara lainnya memihak kedua gerakan lawannya. Tetapi kebanyakan mendukung sikap Organisasi Persatuan Afrika (OAU) yang tidak memihak dan mendesak kedua pihak untuk berdamai dan membentuk suatu pemerintahan persatuan nasional.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Lihat "The Battle for Angola", Foreign Report, 12 Nopember 1975; "Angola's battle for birth", Newsweek, 17 Nopember 1975.

<sup>2</sup> Lihat Alan Rake, "Shades of Biafra in the Angola War", karangan Gemini yang diambil alih The Indonesia Times, 29 Nopember 1975; lihat juga Kompas, 14 Nopember 1975.



Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa MPLA mendapatkan bantuan militer dari negara-negara komunis dan sosialis, dan kedua gerakan lawannya dari negara-negara demokrasi dan kapitalis barat. Yang pertama-tama melibatkan dirinya secara besar-besaran adalah Uni Soviet dan Kuba. Berkat bantuan itu MPLA memiliki suatu kekuatan militer yang besar dan dapat merebut kota-kota di Angola Selatan yang dikuasai UNITA dan menangkis serangan-serangan FNLA dari jurusan utara. Melihat perkembangan itu negara-negara barat dengan cepat membanjiri FNLA dan UNITA dengan senjata dan amunisi, sehingga kedua gerakan ini tidak hanya mampu mematahkan ofensif MPLA tetapi juga merebut kembali kota-kota tersebut dan mengepung Luanda serta daerah sekitarnya. Perkembangan baru ini mendorong Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya untuk melancarkan suatu operasi besar-besaran guna menyelamatkan MPLA. Secara demikian terjadilah suatu perlombaan senjata dan eskalasi perang saudara.

Lebih dari itu perang saudara di Angola telah meningkat menjadi suatu pertarungan negara-negara besar, khususnya Uni Soviet dan Amerika Serikat, untuk menunjang strategi global mereka.<sup>1</sup> Hal itu dapat dilihat dalam besarnya bantuan militer yang diberikan blok Soviet dan cepatnya penyaluran bantuan itu. Secara terang-terangan Uni Soviet dan Kuba melibatkan dirinya dalam skala yang mengejutkan FNLA dan UNITA serta negara-negara pendukung mereka. Lagi pula keterlibatan itu tidak hanya berlawanan dengan sikap resmi OAU tetapi juga memberikan peluang kepada Afrika Selatan untuk tampil ke muka sebagai pembela bagian selatan benua itu terhadap ancaman komunis. Akan tetapi semuanya itu mungkin tidak cukup untuk menjamin kemenangan MPLA.

Kemungkinan kegagalan MPLA itu membuat orang bertanya-tanya mengapa Uni Soviet dan Kuba secara terang-terangan melibatkan diri dalam perang saudara di Angola. Kedua negara itu rupanya sangat berkepentingan MPLA mendapatkan kemenangan dengan bantuan mereka. Angola tidak hanya kaya sumber alam, tetapi juga memiliki arti strategi yang penting. Wilayahnya dapat digunakan untuk menunjang gerakan-gerakan kemerdekaan di Namibia, Afrika Selatan dan Rhodesia, dan untuk mengawasi

---

<sup>1</sup> Lihat Patrick Gilkes, "The big powers make Angola their playground", The Indonesia Times, 11 Oktober 1975, yang mengambil alihnya dari Gemini.



jalur pelayaran Tanjung Harapan, salah satu urat nadi dunia barat. Suatu pemerintah komunis di Angola yang mendapatkan kekuasaannya berkat bantuan Uni Soviet dapat diharap akan bersedia menunjang strategi globalnya itu. Selain itu Uni Soviet dan Kuba melibatkan diri di pihak MPLA ketika gerakan ini nampak akan menang. Dengan perkataan lain, kedua negara itu melotakkan taruhannya atas pihak yang dikiranya akan mengalahkan lawannya dan berkuasa atas Angola. Sesudah itu Uni Soviet dan Kuba sudah tidak dapat mundur tanpa menderita suatu kekalahan politik. MPLA harus dibantu sedemikian rupa agar mendapatkan kemenangan atau paling tidak menghindari suatu kekalahan yang meyakinkan. Itulah kiranya pertimbangan di belakang keputusan kedua negara itu untuk meningkatkan dan mempercepat bantuan militer mereka.<sup>1</sup>

Akan tetapi keterlibatan mereka itu telah mempunyai suatu akibat yang merugikan kedudukan mereka. OAU dan banyak negara Afrika semakin sengit mengancam campur tangan Soviet dalam perang saudara di Angola itu. Campur tangan itu bahkan telah menimbulkan suatu krisis dalam hubungan antara Uni Soviet dan Uganda. Campur tangan itu juga telah memberikan kesempatan kepada Cina untuk mengancam Uni Soviet sebagai blagg keladi eskalasi perang saudara di Angola dan sebagai pemecah belah persatuan Afrika.

Bantuan militer Soviet secara besar-besaran kepada MPLA itu juga memancing kecemasan pedas dari Amerika Serikat. Menlu Henry Kissinger mengatakan bahwa secara demikian Uni Soviet telah membawa persaingan negara besar ke Afrika dan bahwa campur tangan itu mengancam detente antara kedua negara super itu.<sup>2</sup> Selain itu Amerika Serikat juga memberikan bantuan militer kepada FNLA dan UNITA, sebagian besar lewat Zaire yang juga mendukung kedua gerakan itu. Hal yang sama dilakukan Inggris, Perancis, Jerman Barat dan Afrika Selatan, yang melihat campur tangan Soviet itu sebagai usaha ekspansi komunis di Afrika bagian selatan. Khususnya Afrika Selatan melihat kemenangan MPLA sebagai suatu ancaman baginya dan oleh sebab itu sangat berkepentingan FNLA dan UNITA mendapatkan kemenangan.

<sup>1</sup> Lihat Alan Rakes, "Shades of Biafra in the Angola War", ulasan Gemini yang diambil alih oleh The Indonesia Times, 29 Nopember 1975; "The Russians have come", Newsweek, 1 Desember 1975...

<sup>2</sup> Lihat "Rival Angolan forces prepare for independence", laporan Reuter yang diambil alih Indonesian Observer, 4 Nopember 1975; lihat juga laporan UPI yang dimuat dalam Indonesian Observer, 15 Desember 1975.



Dalam rangka itu Afrika Selatan tidak hanya memberikan bantuan senjata dan bahan bakar serta menyediakan fasilitas-fasilitas, tetapi juga mengirinkan pasukan-pasukan untuk menjaga proyek bondungan di Calueque dan Cumene, suatu usaha bersama Afrika Selatan dan Portugal, dan untuk bertempur di pihak UNITA. Afrika Selatan juga menggunakan kesempatan itu untuk menyerang gorilyawan-gorilyawan SWAPO yang beroperasi dari Angola selatan. Menurut perkiraan di Lusaka, antara 2.500 dan 6.000 orang pasukan Afrika Selatan telah dikirimkan ke Angola, sedangkan 3.000-4.000 orang lainnya disiapkan. Antara lain berkat bantuan militer Afrika Selatan itu pasukan-pasukan FNLA dan UNITA berhasil memukul mundur pasukan-pasukan MPLA dan merebut kembali kota-kota di Angola selatan. Akan tetapi bantuan itu juga menimbulkan komplikasi-komplikasi bagi kedua gerakan itu. Dengan tersiarnya berita tentang keterlibatan Afrika Selatan itu, banyak negara Afrika mengancam FNLA dan UNITA, dan Nigeria, Ethiopia serta Tanzania bahkan telah meninjau kembali sikap mereka dan mengakui Republik Rakyat Angola. Kebencian mereka terhadap politik apartheid Afrika Selatan ternyata lebih besar daripada perlawanan mereka terhadap campur tangan Uni Soviet dan Kuba dalam perang saudara di Angola.<sup>1</sup>

#### Usaha-usaha perdamaian

Namun di samping campur tangan asing yang mempersukar penyelesaian sengketa, terdapat pula kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak dan mendesak mereka untuk membentuk suatu pemerintah persatuan nasional. Kekuatan yang paling giat berjuang untuk tujuan itu adalah Organisasi Persatuan Afrika (OAU), tetapi usaha-usahanya sejauh ini tidak memberikan hasil yang diharapkan. Pada 1 Nopember 1975 Komisi Pertahanan OAU bersidang di Kampala dan mengundang ketiga gerakan untuk bersama-sama mencari suatu penyelesaian damai. Akan tetapi usaha inipun gagal, terutama karena MPLA menolak membagi kekuasaan dengan lawan-lawannya. Selain itu OAU itu sendiri kurang mampu mengambil tindakan-tindakan yang efektif karena terdapat perpecahan dalam tubuhnya. Usul agar OAU mengirimkan pasukan-pasukan ke Angola untuk mengontrol perporangan dan mengawasi gencatan senjata tidak hanya

<sup>1</sup> Lihat David B. Ottaway, "South Africa nears bigger role in Angola War", The Guardian, 7 Desember 1975.



ditolak MPLA dan FNLA, tetapi juga oleh Zaire yang mendukung FNLA. Hasil maksimal yang sejauh ini dapat dicapainya ialah berseru kepada ketiga gerakan untuk menghentikan tombak menembak dan bersama-sama membentuk suatu pemerintah yang akan berkuasa sampai pemilihan umum, tetapi seruan itu ditolak MPLA yang masih percaya akan menang.<sup>1</sup>

Juga seruan Sokjen PBB Kurt Waldheim pada 11 Nopember 1975 bahwa MPLA, FNLA dan UNITA hendaknya mengakhiri pertentangan mereka dan berdamai, dan bahwa masyarakat internasional hendaknya mendukung usaha OAU untuk mencegah eskalasi perang saudara di Angola, tidak mendapatkan sambutan sewajarnya. Perang saudara berlangsung terus dan bantuan militer negara-negara pendukung bahkan meningkat.<sup>2</sup>

Sejauh ini PBB belum turun tangan, karena OAU dan negara-negara anggotanya memandang perang saudara di Angola sebagai masalah mereka dan belum menghentikan usaha perdamaian mereka. Akan tetapi persoalan kiranya akan diserahkan kepada PBB apabila sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak mampu untuk menyelesaikannya.

#### Kemungkinan-kemungkinan

Mengenai penyelesaian sengketa di Angola ini terdapat beberapa kemungkinan. Pertama, bila salah satu pihak mendapatkan kemenangan yang menentukan dan monopoli kekuasaan. Bila MPLA yang beruntung itu, maka Angola akan menjadi suatu negara Marxis dengan sistim pemerintahan partai tunggal dan ekonomi sosialis. Sebagai imbalan bagi bantuannya, Uni Soviet akan mempunyai pengaruh yang besar dan dapat menggunakan wilayahnya sebagai pangkalan untuk menunjang strategi globalnya. Sebaliknya jika lawan-lawannya yang menang, maka Angola akan menjadi suatu negara demokrasi sosial dengan suatu pemerintah koalisi FNLA-UNITA, yang menganut sistim sosialis tetapi memberi tempat kepada usaha swasta dan terbuka untuk investasi asing.

Kemungkinan kedua ialah bahwa tidak ada pihak yang akan mendapatkan kemenangan serupa itu karena sama kuat. Dalam keadaan itu kedua pihak dapat mencapai kesepakatan untuk membagi

<sup>1</sup> Lihat laporan UPI yang dimuat Indonesian Observer, 10 Nopember 1975.

<sup>2</sup> Lihat Antara, 12 Nopember 1975.



kekuasaan dan membentuk suatu pemerintah koalisi MPLA-FNLA-UNITA yang akan berkuasa sampai pemilihan umum. Maka Angola akan menjadi suatu negara demokrasi sosial, yang menganut sistim pemerintahan banyak partai dan sistim ekonomi sosialis yang memberi tempat kepada usaha swasta. Dalam pemerintah koalisi ini UNITA akan memegang peranan penting sebagai penengah dan unsur pemersatu. Akan tetapi juga mungkin tidak akan tercapai sopakat kata serupa itu. Maka Angola akan pecah menjadi dua negara, Republik Rakyat Angola di bawah MPLA dan Republik Demokrasi Rakyat Angola di bawah FNLA-UNITA, yang pertama Marxis yang kedua demokrasi sosial. Garis gencatan senjata akan dibekukan menjadi perbatasan. Republik Rakyat Angola akan lebih kecil dan hanya mencakup Luanda serta daerah sekitarnya, sedangkan daerah-daerah lainnya akan menjadi wilayah Republik Demokrasi Rakyat Angola dengan Huambo sebagai ibukota. Selanjutnya kedua negara itu akan terpisah satu sama lain atau membentuk suatu federasi. Jika pihak-pihak memilih federasi, kemungkinan besar UNITA akan mengusulkan pembentukan suatu federasi tiga negara di mana pembagian federasi dalam negara-negara bagian itu didasarkan atas wilayah yang dikuasai gerakan masing-masing pada akhir perang saudara.

Mengenai enklave Cabinda, yang kaya minyak dan menjadi rebutan antara MPLA dan Front Pembebasan Enklave Cabinda (FLEC) terdapat dua kemungkinan, yaitu ikut serta dalam nasib MPLA atau mendapatkan kemerdekaan. MPLA yang kini menguasainya berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya, akan tetapi FLEC juga berjuang mati-matian untuk membebaskannya dari kekuasaan asing dan membentuk suatu negara tersendiri sesuai dengan keinginan mayoritas penduduknya. Kenyataannya Cabinda tidak mempunyai ikatan dengan Angola dan baru pada tahun 1956 secara administratif disatukan dengan negeri itu, tetapi tetap di bawah seorang Gubernur. Selanjutnya FLEC tidak hanya didukung oleh rakyat setempat, tetapi juga oleh Presiden Mobutu dari Zaire yang lebih suka Cabinda bergabung dengan Zaire atau berdiri sendiri. Bahkan diberitakan bahwa mengenai hal itu telah tercapai suatu pengertian antara Zaire dan FNLA sebagai imbalan bagi bantuan Zaire untuk FNLA dan UNITA.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tentang masalah Cabinda lihat Gilbert Compte, "Angola's struggle for independence. In the shadow of Kinshasa", The Guardian, 14 Juni 1975; "Cabinda secedes", Newsweek, 11 Agustus 1975.



## Prospek penyelesaian

Dari perimbangan kekuatan pihak-pihak sengketa dan adanya campur tangan negara-negara besar yang berkepentingan kiranya dapat disimpulkan bahwa perang saudara tidak akan menyelesaikan persoalan karena tiada pihak yang akan mendapatkan kemenangan yang menentukan.<sup>1</sup> Sengketa baru akan dapat diselesaikan setelah pihak-pihak, khususnya MPLA, menyadari hal itu dan bersedia mencari suatu penyelesaian politik. Sikap CAU yang tidak memihak tetapi mendesak ketiga gerakan agar berdamai dan membentuk suatu pemerintah persatuan nasional kiranya akan memegang peranan dan mempercepat proses itu. Maka pada saatnya kedua pihak akan mengadakan perundingan-perundingan. Oleh sebab tiada gerakan yang menginginkan pembagian negeri, kemungkinan besar ketiga gerakan itu akhirnya akan mencapai kesepakatan kata untuk membentuk suatu pemerintah koalisi nasional yang akan berkuasa sampai pemilihan umum. Dalam perundingan-perundingan itu Jonas Savimbi kiranya akan memainkan peranan yang penting sebagai penengah antara Holden Roberto dan Agostinho Neto. Sebagai seorang moderat, yang yakin bahwa sengketa di Angola hanya dapat diselesaikan secara politik, dia akan berusaha meyakinkan kedua pemimpin itu untuk berkompromi. Sebagai hasilnya akan dibentuk suatu pemerintah persatuan nasional yang akan berkuasa sampai pemilihan umum. Parlemen yang akan dihasilkan pemilihan umum ini akan menyusun konstitusi dan membentuk pemerintah sesuai dengan kemauan rakyat. Berlainan dengan negara-negara bekas koloni Portugis di Afrika lainnya, Angola kiranya akan menganut sistem banyak partai dan lebih terbuka untuk usaha swasta dan investasi asing.

Pemerintah yang akan dibentuk setelah tercapai perdamaian itu jelas akan mempunyai tugas yang sangat berat. Selain menyembuhkan luka-luka perang saudara dan membangun suatu bangsa yang kompak, pemerintah itu harus juga membangun kembali perekonomian negeri yang hancur akibat perang saudara yang berlarut-larut itu, tetapi kekurangan modal dan tenaga ahli di segala bidang, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Suatu keuntungan besar ialah bahwa Angola memiliki kekayaan alam yang berlimpah berupa tanah yang subur, potensi tenaga air yang besar, cadangan minyak di Cabinda dan Angola utara, biji besi di Cassinga, intan dan lain sebagainya. Perkebunan kopi, sisal, kapas dan tobu, yang sebelum perang

<sup>1</sup> Lihat laporan Reuter tentang pendapat analisis-analisis Amerika Serikat, yang dimuat Indonesian Observer, 24 Nopember 1975.



saudara merupakan sumber utama devisa, kiranya juga dapat dikembangkan lagi. Untuk menggali dan mengolah kekayaan alam itu Angola memerlukan modal dan tenaga ahli yang harus mendatangkan dari luar negeri. Dengan eksodus penduduk kulit putih sebagai akibat perang saudara Angola kehilangan tenaga-tenaga ahli yang menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan perekonomian, dan dewasa ini belum tersedia tenaga ahli dalam jumlah yang mencukupi di kalangan rakyat setempat untuk mengisi kekosongan itu. Tetapi dalam hubungan ini perlu didatat, bahwa keadaan Angola jauh lebih baik daripada keadaan Zaire ketika mendapatkan kemerdekaan. Selama perang gerilya ketiga gerakan juga memperhatikan soal-soal lain, khususnya pendidikan dan pembentukan kader. Sebagai hasilnya mereka kini mempunyai sejumlah doktor, teknikus, ahli hukum, ahli ekonomi, ahli politik, guru, perawat dan lain sebagainya.

Kebutuhan akan modal untuk sebagian kiranya akan dapat dipenuhi dengan menggalakkan investasi asing. Asal terjamin keamanan, dan kestabilan politik dan diciptakan syarat-syarat investasi yang menarik, investor-investor asing kiranya akan berdatangan untuk menanamkan modal mereka dalam eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam tersebut yang dibutuhkan negara-negara industri. Dengan menetapkan lokalisasi tenaga secara berangsur-angsur sebagai salah satu syarat investasi, Angola kiranya juga akan dapat memenuhi sebagian kebutuhan akan tenaga ahli. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu undang-undang penanaman modal yang tidak hanya menjamin kepentingan-kepentingan investor-investor asing melainkan juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan setempat. Hal itu kiranya dapat diharapkan dari kerjasama ketiga gerakan yang mempunyai haluan yang berbeda-beda. Dengan kekayaan alam yang berlimpah Angola dapat berkembang menjadi salah satu negara yang paling penting di benua Afrika.

### Penutup

Salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari perang saudara di Angola ialah bahwa pertentangan antar golongan berdasarkan ideologi selalu berbahaya karena mudah menjadi permusuhan yang sengit, dan bahwa perang saudara yang dikobarkan oleh pertentangan ideologi itu tidak hanya lebih seru dari pertentangan lain-lain tetapi juga lebih sukar diselesaikan.



Oleh sebab itu perbedaan-perbedaan ideologi tidak boleh diperuncing menjadi pertentangan dan permusuhan antar golongan. Sehubungan dengan itu yang berwajib hendaknya selalu waspada dan mengambil sikap yang tegas terhadap unsur-unsur yang berusaha memperuncing perbedaan-perbedaan itu dan mengobarkan pertentangan-pertentangan ideologi. Sebaliknya usaha-usaha yang diambil untuk membina kerukunan antar golongan dalam masyarakat yang pluralistis hendaknya disambut dengan baik dan dibantu.

Kesimpulan lain ialah bahwa kita harus selalu waspada terhadap bahaya yang selalu laten dalam gerakan komunis dan menghadapinya dengan tegas. Sasaran gerakan komunis dimanapun adalah monopoli kekuasaan dan diktatur yang akan dicapai dengan segala cara, termasuk kekerasan bila terbuka kesempatan. Selama merasa belum cukup kuat golongan komunis bersedia untuk bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnya, tetapi kerjasama ini bersifat taktis semata-mata dan setiap waktu dapat ditarik kembali. Mereka akan mengakhiri kerjasama itu dan menggunakan kekerasan untuk merobut kekuasaan setelah merasa kuat untuk mengalahkan lawan-lawannya. Selain waspada terhadap bahaya komunis, kita harus juga berusaha menetralkan daya tarik komunisme dan kekuatan gerakan komunis dengan mengurangi dan memberantas kepincangan-kepincangan sosial serta memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Komunisme hanya dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat yang pincang. Dalam masyarakat yang melaksanakan keadilan sosial menuju kemakmuran yang merata gerakan komunis kehilangan daya tariknya.







